RENCANA KINERJA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENJA-OPD)
TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 126 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;

20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 112).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
6. Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah dokumen perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat RKA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024-2026, hasil evaluasi Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun lalu.

Pasal 4

(1) Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

BAB V : PENUTUP.

(2) Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2-8- 2023

BUPATI PASURUAN,

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2-8- 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 126

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 126 TAHUN 2023
TANGGAL : 2 AGUSTUS 2023

RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (UU No. 25 Th 2004–SPPN) dimana perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan merupakan acuan perencanaan kegiatan selama satu tahun. Adapun penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan amanat dari mengacu rencana kerja pembangunan daerah (RKPD), RPD dan Renstra tahun 2024-2026. Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 melalui pembangunan infrastruktur, percepatan peningkatan ekonomi dan pengentasan, pengangguran, peningkatan pencapaian IPM, pertumbuhan ekonomi, dukungan terhadap percepatan pencapaian Universal Akses dan optimalisasi pemanfaatan daerah dengan program/kegiatan prioritas lainnya berdasarkan aspirasi/partisipasi masyarakat melalui musrenbang.

Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah dokumen perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

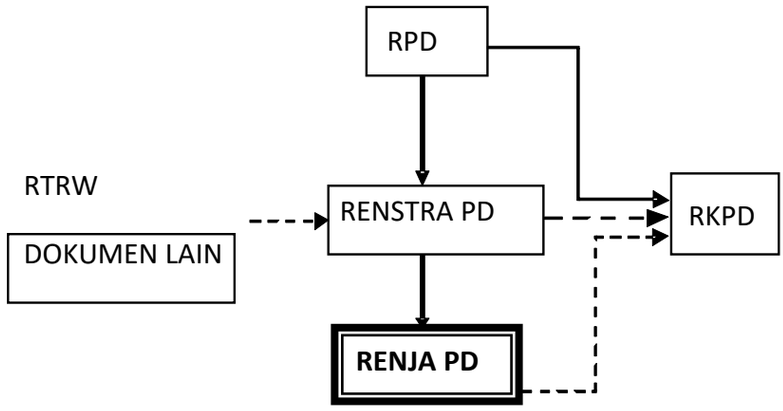

Penyusunan rancangan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi sesuai dengan Tupoksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan khususnya peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman kumuh, pelayanan air bersih, pelayanan sanitasi yang layak, kebutuhan jalan lingkungan, rumah layak huni, dan optimalisasi data pertanahan untuk menunjang pembangunan kepentingan umum. Sasaran dan target tersebut diharap bisa tercapai dan terpenuhi di tahun 2024. Rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005–2025 serta RPJMD 2014–2019 Provinsi Jawa Timur dan RPD Kabupaten Pasuruan 2024–2026.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 secara normatif memperhatikan hirarki peraturan perundang–undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian DAU yg ditentukan penggunaannya TA 2023;
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
28. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

30. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan daerah Otonom Baru;
31. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlinduangan Anak Nomor: 270/M.PPPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
32. Surat Edaran Kepmendagri No. 900.1.14.3/1483/SJ tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023, dan DAK TA 2023;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan 2005 – 2025;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 - 2029;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan

Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan 2018 – 2023;
41. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 176 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan;
42. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023;
43. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024 – 2026;
44. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024–2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
3. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta penganggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.
4. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam dokumen RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 dengan tetap memperhatikan RKPD, RPD dan Renstra.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian rancangan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman disusun menurut sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan tahun 2022, dan realisasi Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan sampai dengan tahun 2023 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan atau realisasi APBD.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target P-Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun sebelumnya. Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan selama tahun 2022 dan perkiraan capaian target sampai dengan tahun 2023. Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran dan realisasi fisik berbentuk output pada tahun 2022, maka perlu dicermati kembali hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan tahun berjalan (tahun 2023) sebagaimana tampak pada Tabel 2.1 sebagaimana terlampir.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian P-Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kabupaten Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		
							Target Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)
2019-2020													
1	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**% pemenuhan administrasi kantor**	**100**	**%**	**100**	**%**					**100**	**%**	**100%**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	300	buah	300	buah					300	buah	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	24	bulan	24	bulan					24	bulan	100%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	98	jenis	98	jenis					98	jenis	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	40	jenis	40	jenis					40	jenis	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	18	jenis	18	jenis					18	jenis	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	60	jenis	60	jenis					60	jenis	100%
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	1500	kotak	1500	kotak					1500	kotak	100%
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	76	kali	76	kali					76	kali	100%
	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah jasa tenaga perkantoran yang tersedia	56	org	56	org					56	org	100%
	Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang dikembangkan	18	orang	18	orang					18	orang	100%
	Penyusunan Laporan Kinerja Dan Keuangan	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun	6	bulan	6	bulan					6	bulan	100%
2	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**% meningkatnya sumber daya aparatur yang memadai**	**29,62963**	**%**	**29,63**	**%**					**29,63**	**%**	**100%**
	Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang dikembangkan	16	org	16	org					16	org	100%
3	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**% pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang ditingkatkan**	**50**	**%**	**50**	**%**					**50**	**%**	**100%**
	Penyusunan Laporan Kinerja Dan Keuangan	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun	6	bulan	6	bulan					6	bulan	100%
4	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**% sarpras kondisi baik**	**78,82353**	**%**	**78,82**	**%**					**78,82**	**%**	**100%**
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diadakan	1	unit	1	unit					1	unit	100%
	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	36	unit	36	unit					36	unit	100%
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara rutin / berkala	68	unit	68	unit					68	unit	100%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair	Jumlah mebelair yang dipelihara rutin / berkala	120	unit	120	unit					120	unit	100%

	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara rutin / berkala	116	unit	116	unit					116	unit	100%
5	**PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN SANITASI**	**% RT yang terlayani air bersih**	**85,79**	**%**	**85,79**	**%**					**85,79**	**%**	**100%**
		% RT yang terlayani sanitasi	82,45	%	82,45	%					82,45	%	100%
	Hibah Air Minum Pedesaan	Jumlah KK yang terlayani air minum	3800	KK	3.800	KK					3800	KK	100%
	Kegiatan Pamsimas	Jumlah KK yang terlayani air minum	1000	KK	1.000	KK					1000	KK	100%
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Jumlah KK yang terlayani air minum	5731	KK	5.731	KK					5731	KK	100%
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Jumlah KK yang terlayani akses sanitasi	389287	KK	389.287	KK					389287	KK	100%
	Pembangunan Saluran Drainase Permukiman	luas genangan yang tertangani	4,77	Ha	4,77	Ha					4,77	Ha	100%
	Perluasan SPAM perpipaan melalui kemampuan idle kapasitas sistem penyediaan air minum (SPAM) terbangun (Reguler)	Jumlah KK yang terlayani air minum	900	KK	900	KK					900	KK	100%
	Perluasan SPAM Perpipaan Melalui Sumberdaya Kapasitas Idle Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Terbangun (Penugasan)	Jumlah KK yang terlayani air minum	11040	KK	11.040	KK					11040	KK	100%
	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman dan / atau Perkotaan (Reguler)	Jumlah KK yang terlayani akses sanitasi	468	KK	468,00	KK					468	KK	100%
6	**PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT KAWASAN PERMUKIMAN**	**% pengurangan kawasan kumuh**	**46,73**	**%**	**46,73**	**%**					**46,73**	**%**	**100%**
	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	Luas wilayah permukiman kumuh yang ditangani	41,69	Ha	41,69	Ha					41,69	Ha	100%
	Pembangunan / Pemeliharaan Jl Lingkungan Perkotaan	Panjang jalan lingkungan perkotaan yang ditangani	6958	m'	6958	m'					6958	m'	100%
7	**PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN**	**% tersedianya infrastruktur permukiman**	**2,07**	**%**	**2,07**	**%**					**2,07**	**%**	**100%**
	Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Jl Lingkungan Perkotaan	Panjang jalan lingkungan perkotaan yang ditangani	9900	m'	9.900	m'					9900	m'	100%
	Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jl. Lingkungan Perkotaan	Panjang jalan lingkungan perkotaan dengan TPT	525	m'	525	m'					525	m'	100%
8	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**% pengembangan rumah swadaya**	**28,11**	**%**	**28,11**	**%**					**28,11**	**%**	**100%**
9	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**% peningkatan rumah layak huni**	**32,38**	**%**	**32,38**	**%**					**32,38**	**%**	**100%**
	Kegiatan Fasilitasi dan stimulasi pengembangan rumah swadaya bagi masyarakat kurang mampu (pendampingan RTLH)	Jumlah pelaporan pendampingan kegiatan pengembangan rumah swadaya	4546	unit	4546	unit					4546	unit	100%
	Kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah keg. koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan dan kaw. permukiman	5	kali	5	kali					5	kali	100%
	Kegiatan Penyusunan Database Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah database perumahan dan kawasan permukiman yang disusun	17	paket	17	paket					17	paket	100%
	Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah sosialisasi kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan	7	kali	7	kali					7	kali	100%

	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah peraturan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang disusun dan	2	peraturan	2	peraturan					2	peraturan	100%
	Kegiatan Bantuan stimulan peningkatan kualitas, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan	Jumlah pelaporan pendampingan kegiatan pengembangan rumah swadaya	388	unit	388	unit					388	unit	100%
10	**PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL**	**% RT yang terakses sanitasi**	**1,6**	**%**	**1,6**	**%**					**1,60**	**%**	**100%**
	Penyediaan/Pemeliharaan saluran air limbah, Sanitasi, dan Air Bersih (Pembangunan Drainase)	Luas genangan yang tertangani	9,01	Ha	9,01	Ha					9,01	Ha	100%
	Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih (Penyediaan Sarana Pengelolaan Air	Jumlah KK yang terlayani akses sanitasi	256	KK	256	KK					256	KK	100%
	Pembangunan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan / atau Jembatan Pasar, Sarana / Prasarana Pendukung Pariwisata (Pembangunan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan)	Panjang jalan lingkungan yang ditangani	578	m'	578	m'					578	m'	100%
	Pembangunan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan / atau Jembatan Pasar, Sarana / Prasarana Pendukung Pariwisata (Pembangunan Turap / Talud / Bronjong)	panjang jalan lingkungan dengan TPT	578	m'	578	m'					578	m'	100%
11	**PROGRAM PEMBANGUNAN GEDUNG**	**% bangunan gedung yang dibangun / direhab**	**42,98**	**%**	**42,98**	**%**					**42,98**	**%**	**100%**
	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	4	unit	4	unit					4	unit	100%
	Kegiatan rehab sedang/berat bangunan gedung	Jumlah rumah dinas / gedung kantor yang direhab	13	unit	13	unit					13	unit	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Gedung	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5	unit	5	unit					5	unit	100%
12	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGATURAN BANGUNAN GEDUNG**	**% peningkatan jumlah Bangunan Gedung yang terstandarisasi SLF**	**21,08**	**%**	**21,08**	**%**					**21,08**	**%**	**100%**
	Kegiatan Penerbitan SLF dan penetapan TAGB	Jumlah SLF yang diterbitkan	10	berkas	10	berkas					10	berkas	100%
	Kegiata Monitoring evaluasi bangunan Gedung	Jumlah kawasan yang di monev bangunan gedungnya	5	kec	5	kec					5	kec	100%
	Kegiatan Sosialisasi Perda Bangunan Gedung	Jumlah sosialisasi Perda bangunan gedung	85	org	85	org					85	org	100%
13	**PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMBINAAN DAN PENGATURAN BANGUNAN GEDUNG**	**% bangunan gedung yang dibangun / direhab**	**99,995**	**%**	**99,995**	**%**					**99,995**	**%**	**100%**
	Pembangunan Gedung	Jumlah gedung kantor yang dibangun	14	unit	14	unit					14	unit	100%
	Rehab sedang/berat bangunan gedung	Jumlah rumah dinas / gedung kantor yang direhab	9	unit	9	unit					9	unit	100%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Gedung	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3	unit	3	unit					3	unit	100%
	Penerbitan SLF dan penetapan TABG	Jumlah SLF yang diterbitkan	8	berkas	8	berkas					8	berkas	100%
	Kegiata Monitoring evaluasi bangunan Gedung	Jumlah kawasan yang di monev bangunan gedungnya	4	kec	4	kec					4	kec	100%
	Sosialisasi Perda Bangunan Gedung	Jumlah sosialisasi Perda bangunan gedung	90	org	90	org					90	org	100%
					2021								
1	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**87,08**	**%**	**87,08**	**%**					**87,08**	**%**	**100%**
1.1	*Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota*	*Prosentase pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Minum*	*87,08*	*%*	*87,08*	*%*					*87,08*	*%*	*100%*
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah KK yang terlayani air minum	6046	KK	6046	KK					6046	KK	100%

2	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Prosentase pengelolaan dan pengembangan Sistem Air**	**83,28**	**%**	**83,28**	**%**					**83,28**	**%**	**100%**
2.1	*Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Prosentase pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah*	*83,28*	*%*	*83,28*	*%*					*83,28*	*%*	*100%*
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah KK yang terlayani akses sanitasi	393.220	KK	393.220	KK					393.220	KK	100%
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**Persentase pengembangan kawasan permukiman**	**8,66**	**%**	**8,66**	**%**					**8,66**	**%**	**100%**
3.1	*Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota*	*Prosentase penyelenggaraan infratruktur di kawasan permukiman*	*8,66*	*%*	*8,66*	*%*					*8,66*	*%*	*100%*
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jalan lingkungan dan tembok penan tanah perkotaan yang ditangani	22893	M	22893	M					22893	M	100%
		Luas Genangan yang tertangani	3,5	0	3,5						3,5	0	100%
4	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Bangunan Gedung yang Tertangani**	**99,99**	**%**	**99,99**	**%**					**99,99**	**%**	**100%**
4.1	*Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung*	*Persentase penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota*	*0,01*	*%*	*0,01*	*%*					*0,01*	*%*	*100%*
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah SLF yang diterbitkan	23	Berkas	23	Berkas					23	Berkas	100%
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung kantor yang dibangun	21	Unit	21	Unit					21	Unit	100%
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang di monev bangunan gedungnya	1	Kecamatan	1	Kecamatan					1	Kecamatan	100%
	Rebilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah dinas / gedung kantor yang direhab	12	Unit	12	Unit					12	Unit	100%
	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3	Unit	3	Unit					3	Unit	100%
5	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Prosentase penataan bangunan dan lingkungan**	**100**	**%**	**100**	**%**					**100**	**%**	**100%**
5.1	*Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota*	*Prosentase penataan bangunan dan lingkungan*	*100*	*%*	*100*	*%*					*100*	*%*	*100%*
	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah database perumahan dan kawasan permukiman yang disusun	6	Database	6	Database					6	Database	100%

6	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**95,43**	**%**	**95,43**	**%**					**95,43**	**%**	**100%**
6.1	*Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Prosentase Pemenuhan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*100*	*%*	*100*	*%*					*100*	*%*	*100%*
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	3	Dokumen					3	Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang sesuai dengan ketentuan	1	Dokumen	1	Dokumen					1	Dokumen	100%
6.2	*Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah*	*100*	*%*	*100*	*%*					*100*	*%*	*100%*
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	47	orang.bulan	47	orang.bulan					47	orang.bulan	100%
6.3	*Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Prosentase pemenuhan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur*	*75*	*%*	*75*	*%*					*75*	*%*	*100%*
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3	orang	3	orang					3	orang	100%
6.4	*Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi umum*	*93*	*%*	*93*	*%*					*93*	*%*	*100%*
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9	Unit	9	Unit					9	Unit	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30	Unit	30	Unit					30	Unit	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	49	Unit	49	Unit					49	Unit	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan pengadaan	20	Unit	20	Unit					20	Unit	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	500	Orang	500	Orang					500	Orang	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan SKPD	19	Laporan	19	Laporan					19	Laporan	100%
6.5	*Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah yang diadakan*	*20*	*Unit*	*20*	*Unit*					*20*	*Unit*	*100%*
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	Unit	3	Unit					3	Unit	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	17	Unit	17	Unit					17	Unit	100%
6.6	*Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	*100*	*%*	*100*	*%*					*100*	*%*	*100%*
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim melalui jasa kurir	150	Kali	150	Kali					150	Kali	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet	12	rek-bln	12	rek-bln					12	rek-bln	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa layanan umum kantor	62	org.bln	62	org.bln					62	org.bln	100%
6.7	*Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara*	*152*	*Unit*	*152*	*Unit*					*152*	*Unit*	*100%*
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	34	Unit	34	Unit					34	Unit	100%
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	60	Unit	60	Unit					60	Unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dalam pemeliharaan / rehabilitasi	54	Unit	54	Unit					54	Unit	100%

7	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Prosentase pengembangan perumahan**	**37,38**	**%**	**37,38**	**%**					**37,38**	**%**	**100%**
7.1	*Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan*	*Prosentase rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan perumahan yang sesuai peraturan*	*2*	*Kali*	*2*	*Kali*					*2*	*Kali*	*100%*
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Prosentase kawasan kumuh yang ditangani secara tuntas	1	Kali	1	Kali					1	Kali	100%
8	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Prosentase peningkatan kawasan permukiman dan permukiman kumuh**	**29,95**	**%**	**37,20**	**%**					**37,20**	**%**	**124%**
8.1	*Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh)*	*Prosentase pengurangan kawasan kumuh*	*29,95*	*%*	*37,20*	*%*					*37,20*	*%*	*124%*
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Luas wilayah permukiman kumuh yang disurvei dan ditetapkan	20	Ha	32,82	Ha					32,82	Ha	164%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas pemugaran / peremajaan permukiman kumuh yang dilakukan	20	Ha	32,82	Ha					32,82	Ha	164%
8.2	*Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh)*	*Jumlah RTLH yang direhab*	*1886*	*Unit*	*1886*	*Unit*					*1886*	*Unit*	*100%*
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah RTLH yang diperbaiki	1886	Unit	1886	Unit					1886	Unit	100%
9	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Prosentase peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**	**12,5**	**%**	**12,5**	**%**					**12,5**	**%**	**100%**
9.1	*Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*	*Jumlah urusan PSU perumahan yang diselenggarakan*	*3*	*Kegiatan*	*3*	*Kegiatan*					*3*	*Kegiatan*	*100%*
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah keg. koordinasi penyelenggaraan pengembangan peruman dan kaw. permukiman yang dilakukan	3	Kali	3	Kali					3	Kali	100%
2022-2023													
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100**	**%**		**100**	**%**	**94,88**	**%**	**94,88%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**
1.1	*Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	*36*	*dokumen*		*18*	*dokumen*	*18*	*dokumen*	*100%*	*18*	*dokumen*	**36**	*dokumen*	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	dokumen		2	dokumen	2	dokumen	100%	1	Dokumen	**3**	Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	dokumen		0	dokumen	0	dokumen	0%	8	Dokumen	**8**	Dokumen	100%

1.2	*Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan*	*100*	*%*		*100*	*%*	*100*	*%*	*100%*	*100*	*Persentase*	**100**	*Persentase*	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84	orang/bulan		42	orang/bulan	42	orang/bulan	100%	42	orang/bulan	**84**	orang/bulan	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36	laporan		18	laporan	18	laporan	100%	18	laporan	**36**	laporan	100%
1.3	*Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Persentase administrasi kepegawaian yang dilaksanakan*	*100*	*%*		*100*	*%*	*71,19*	*%*	*71,19%*	*100*	*%*	**100**	*%*	100%
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	orang		4	orang	2	orang	50%	4	Orang	**6**	Orang	75%
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	155	orang		105	orang	97	orang	92,38%	50	Orang	**147**	Orang	95%
1.4	*Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Persentase Pengadaan barang milik daerah*	*100*	*%*		*100*	*%*	*100*	*%*	*100%*	*100*	*%*	**100**	*%*	100%
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	4	unit		2	unit	2	unit	100%	2	Unit	**4**	Unit	100%
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40	unit		20	unit	20	unit	100%	20	Unit	**40**	Unit	100%
1.5	*Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan*	*100*	*%*		*100*	*%*	*100*	*%*	*100,00%*	*100*	*%*	**100**	*%*	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan		2	Laporan	2	Laporan	100,00%	2	Laporan	**4**	Laporan	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	Laporan		36	Laporan	36	Laporan	100,00%	36	Laporan	**72**	Laporan	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20	Laporan		10	Laporan	10	Laporan	100,00%	10	Laporan	**20**	Laporan	100%
1.6	*Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan*	*100*	*%*		*100*	*%*	*75*	*%*	*75,00%*	*100*	*%*	**100**	*%*	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	68	Unit		34	Unit	34	Unit	100,00%	34	unit	**68**	unit	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	140	Unit		70	Unit	70	Unit	100,00%	70	unit	**140**	unit	100%

	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	paket		0	paket	0	paket	0,00%	2	paket	**2**	paket	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	116	Unit		58	Unit	58	Unit	100,00%	58	unit	**116**	unit	100%
1.7	*Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*100*	*%*		*100*	*%*	*93,00*	*%*	*93,00%*	*100*	*%*	**100**	*%*	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	41	Dokumen		16	Dokumen	16	Dokumen	100,00%	25	Paket	**41**	Paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Unit		30	Unit	30	Unit	100,00%	30	Paket	**60**	Paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	98	Unit		49	Unit	49	Unit	100,00%	49	Paket	**98**	Paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40	Unit		20	Unit	20	Unit	100,00%	20	Paket	**40**	Paket	100%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	Laporan		12	Laporan	12	Laporan	100,00%	12	Laporan	**24**	Laporan	100%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Laporan		50	Laporan	29	Laporan	58,00%	50	Laporan	**79**	Laporan	79%
2	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh**	**16,92**	**%**		**14,62**	**%**	**14,75**	**%**	**100,89%**	**17,05**	**%**	**17,05**	**%**	**101%**
2.1	*Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha*	*Luas permukiman kumuh yang ditangani secara tuntas*	*99,5*	*Ha*		*79,5*	*Ha*	*80,2*	*Ha*	*100,88%*	*20*	*Ha*	**100,2**	*Ha*	101%
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	4	dokumen		3	dokumen	3	dokumen	100,00%	1	Dokumen	**4**	Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	25	Ha		5	Ha	5,7	Ha	114,00%	20	Ha	**25,7**	Ha	103%
	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah rekomendasi permohonan izin yang sesuai dengan RP2KP	1	Dokumen		0	Dokumen	0	Dokumen	0,00%	1	Dokumen	**1**	Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan dan /atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	1	Dokumen		0	Dokumen	0	Dokumen	0,00%	1	Dokumen	**1**	Dokumen	100%

3	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	**64,30**	**%**		**63,37**	**%**	**63,37**	**%**	**100,00%**	64,30	**%**	**64,30**	**%**	**100%**
3.1	*Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*	*Jumlah urusan PSU perumahan yang diselenggarakan*	*6*	*Urusan*		*3*	*Urusan*	*3*	*Urusan*	*100%*	*3*	*kegiatan*	**6**	*kegiatan*	100%
	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	*5*	*dokumen*		*0*	*dokumen*	*0*	*dokumen*	*0,00%*	*5*	*dokumen*	**5**	*dokumen*	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Jumlah keg. koordinasi penyelenggaraan pengembangan peruman dan kaw. permukiman yang dilakukan	77	Kali		72	Kali	72	Kali	100,00%	5	lokasi	**77**	lokasi	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	15	Laporan		5	Laporan	5	Laporan	100,00%	10	Laporan	**15**	Laporan	100%
	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	5	laporan		0	laporan	0	laporan	0,00%	5	laporan	**5**	laporan	100%
4	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase ketersediaan rumah layak huni**	*94,63*	**%**		**92,50**	**%**	**94,36**	**%**	**102,01%**	**94,61**	**%**	**94,61**	**%**	**99,98%**
4.1	*Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase Tercapainya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota*	*47,51*	*%*		*44,86*	*%*	*44,67*	*%*	99,58%	*47,32*	*%*	**47,32**	*%*	99,6%
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	3.065	Unit Rumah		1.565	Unit Rumah	1.484	Unit Rumah	94,82%	1.500	unit rumah	**2.984**	unit rumah	97%
5	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Prosentase tercapainya pengembangan perumahan**	**100**	**%**		**100,00**	**%**	**66,67**	**%**	**66,67%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**
5.1	*Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Jumlah dokumen data rumah korban bencana yang disediakan dan direhab atau di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota*	*12*	*Dokumen*		*6*	*Dokumen*	*6*	*Dokumen*	100,00%	*6*	*dokumen*	**12**	*dokumen*	100%
	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	12	Dokumen		*6*	*Dokumen*	*6*	*Dokumen*	100,00%	6	dokumen	**12**	dokumen	100%
5.2	*Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Luas Pembangunan dan Rehabilitasi Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*50,99*	*Ha*		*20,99*	*Ha*	*0,00*	*Ha*	0,00%	*30*	*Ha*	**0**	*Ha*	0%
	Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	4	Dokumen		3	Dokumen	3	Dokumen	100,00%	1	dokumen	**4**	dokumen	100%
	Sub kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terbangun	7	Unit Rumah		0	Unit Rumah	0	Unit Rumah	0,00%	7	Unit Rumah	**7**	Unit Rumah	100%

6	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase tanah aset PEMDA yang teridentifikasi perencanaan penggunaannya**	**14,46**	**%**		**12,12**	**%**	**12,12**	**%**	**100,00%**	**14,46**	**%**	**14,46**	**%**	**100%**
6.1	*Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota*	*Luas bidang tanah yang teridentifikasi perencanaan penggunaannya*	*344,99*	*Ha*		*330,53*	*Ha*	*330,53*	*Ha*	*100,00%*	*14,46*	*Ha*	**344,99**	*Ha*	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4	Laporan		3	Laporan	3	Laporan	100,00%	1	Laporan	**4**	Laporan	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Dokumen		1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	dokumen	**2**	dokumen	100%
7	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	**Persentase Pemanfaatan Aset Pemda yang termanfaatkan**	**37,96**	**%**		**99,50**	**%**	**99,50**	**%**	**100,00%**	**37,96**	**%**	**37,96**	**%**	**100%**
7.1	*Kegiatan penerbitan Izin membuka Tanah*	*Jumlah rekomendasi penerbitan Izin membuka Tanah*	*4*	*kali*		*2*	*kali*	*2*	*kali*	*100,00%*	*2*	*rekomendasi*	**4**	*rekomendasi*	100%
	Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara	2	Dokumen		1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	dokumen	**2**	dokumen	100%
8	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Persentase tanah kosong yang termanfaatkan**	**100**	**%**		**100**	**%**	**96,45**	**%**	**96,448%**	**100**	**%**	**100**	**%**	100%
8.1	*Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong*	*Akumulasi luas tanah kosong yang didata*	*35124,4*	*Ha*		*21.124,4*	*Ha*	*21.124,40*	*Ha*	*100,000%*	*14000*	*Ha*	**35.124,4**	*Ha*	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	2	Laporan		1	Laporan	1	Laporan	100,00%	1	Laporan	**2**	Laporan	100%

Hampir semua program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana terlampir pada tabel 2.1A.

Tabel 2.1. A
Analis Kinerja Pencapaian Renstra 2018 – 2023 sampai dengan Tahun 2023

No.	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Renstra s/d Tahun 2023	Faktor Penyebab	Rencana Tindak Lanjut
	2019-2020			
1	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**100%**		
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN SANITASI**	**100%**		
3	**PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT KAWASAN PERMUKIMAN**	**100%**		
4	**PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN**	**100%**		
5	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**100%**		
6	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**100%**		
7	**PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL**	**100%**		
8	**PROGRAM PEMBANGUNAN GEDUNG**	**100%**		
9	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGATURAN BANGUNAN GEDUNG**	**100%**		
10	**PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMBINAAN DAN PENGATURAN BANGUNAN GEDUNG**	**100%**		
	2021			
1	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**100%**		
2	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**100%**		
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**100%**		
4	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**100%**		
5	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**100%**		
6	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**100%**		
7	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**124,2%**		
	Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh)	124,2%		
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	164%	Mendapat tambahan dana BK Propinsi sejumlah Rp 5.000.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	164%	Mendapat tambahan dana BK Propinsi sejumlah Rp 5.000.000.000,00	
8	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**100%**		
	2022-2023			
1	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**101%**		
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	*101%*		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	103%	Efektifitas pengerjaan PJL	
2	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**100%**		
3	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**99,98%**		
	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	*99,60%*		
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) ha	97%	Ada sebanyak 80 unit tidak bisa dilaksanakan karena : a- Penerima Bantuan tidak bisa mencukupi persyaratan administrasi b- Penerima Bantuan mengundurkan diri karena swadaya yang tidak tersedia	Saat survey lapangan, disiapkan BNBA lebih dari kebutuhan, sehingga jika ada calon penerima yg mengundurkan diri sudah siap data pengganti
4	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**100%**		
5	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**100%**		
6	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	**100%**		
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	**100%**		

Sebagian besar program/kegiatan/sub kegiatan tercapai target kinerjanya dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

a. Perencanaan yang tepat sasaran dan tepat waktu,
b. Perhitungan pagu anggaran yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan.

Sedangkan sub kegiatan yang belum mencapai target yaitu Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha. Hal ini dikarenakan terdapat 80 unit RTLH yang tidak bisa dilaksanakan, yang disebabkan oleh :

a. Penerima bantuan tidak bisa mencukupi persyaratan administrasi,
b. Penerima bantuan mengundurkan diri karena swadaya yang tidak tersedia.

Adapun tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu pada saat Perangkat Daerah melakukan survey lapangan, perlu disiapkan data *By Name By Address* lebih dari kebutuhan, sehingga jika ada calon penerima bantuan RTLH yang mengundurkan diri, maka data penggantinya sudah ada.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan mempunyai 2 (dua) sasaran sebagai berikut :

1) Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman
2) Meningkatnya Kualitas Layanan Pertanahan

Berdasarkan pernyataan sasaran di atas, maka untuk mewujudkan kinerja pelayanan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman maka diperlukan langkah – langkah untuk menjawab permasalahan dan hasil analisa pelayanan kinerja Perangkat Daerah dibandingkan SPM dan IKK antara lain :

1) Peningkatan pengembangan bidang kawasan permukiman yaitu dengan cara peningkatan kualitas sarana dan prasarana di permukiman kumuh;
2) Terpenuhinya akses masyarakat terhadap prasarana sanitasi;
3) Terpenuhinya akses masyarakat terhadap air bersih;
4) Penyediaan rumah layak huni dengan dilakukannya rehabilitasi rumah tidak layak huni;
5) Melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program dan lanjutan yang sudah direncanakan sesuai dengan P-Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD).

Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada Tabel 2.2 sebagaimana terlampir:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	P-RENSTRA 2018 - 2023											
	Tujuan :											
	Indeks Permukiman Layak Huni			92,50	94,61	-	-	94,36	n/a	-	-	belum mencapai target
	Sasaran ;											
	Persentase kawasan kumuh yg ditangani secara tuntas			14,62%	17,05%	-	-	14,75%	n/a	-	-	sudah mencapai target
	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani			44,86%	47,32%	-	-	44,67%	n/a	-	-	belum mencapai target, dikarenakan ada 81 unit RTLH yang tidak memenuhi syarat ketika dilakukan proses verifikasi
	Persentase Penetapan Persetujuan Lokasi untuk Pembangunan Kepentingan Umum			32,07%	64,13%	-	-	32,07%	n/a	-	-	sudah mencapai target
	RENSTRA 2024 - 2026											
1	**Tujuan 1 :**											
	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman			-	-	47,96%	49,71%	44,46%	n/a	47,96%	49,71%	
	Sasaran :											
1.1	Persentase Sarana Prasarana Dasar di Perumahan dan Permukiman dalam kondisi baik			-	-	48,33%	50,08%	44,83%	n/a	48,33%	50,08%	
2	**Tujuan 2 :**											
	Persentase Pengelolaan Pertanahan			-	-	62,83%	64,61%	60,46%	n/a	62,83%	64,61%	
	Sasaran :			-	-							
2.1	Presentase Layanan Pertanahan yang Baik			-	-	60,99%	64,50%	56,58%	n/a	60,99%	64,50%	
2.2	Nilai SAKIP PD			80,09	83	83,25	83,50	82,36	n/a	83,25	83,50%	sudah mencapai target
-		Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	√	100%	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	sudah mencapai target
-		Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	√	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	tidak ada pelaksanaan relokasi program pemerintah kabupaten

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman									
-			Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten/ Kota yang Ditangani	14,62%	17,05%	21,19%	24,87%	14,75%	n/a	21,19%	24,87%	sudah mencapai target
-			Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	5,51%	5,17%	4,87%	4,53%	5,55%	n/a	4,87%	4,53%	sudah mencapai target
-			Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	100%	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	sudah mencapai target
			Bidang Pertanahan									
-			Persentase Pemanfaatan Tanah yang sesuai dengan Peruntukkan Tanahnya Diatas Izin Lokasi Dibandingkan dengan Luas Izin Lokasi yang Diterbitkan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	tidak dikerjakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
-			Persentase Penetapan Tanah untuk Pembanguna Fasilitas Umum	100%	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	sudah mencapai target
-			Tersedianya Lokasi Pembangunan dalam rangka Penanaman Modal	0%	100%	100%	100%	0%	n/a	100%	100%	
-			Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Bersal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100%	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	sudah mencapai target
-			Tersedianya Tanah untuk Masyarakat	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	belum ada kebutuhan terkait izin membuka tanah
-			Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi	100%	100%	100%	100%	0%	n/a	100%	100%	tidak ada sengketa tanah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dimaksudkan untuk menentukan permasalahan atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun sebelumnya, serta capaian kinerja P-Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk penyelarasan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/ target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib/ atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti Universal Akses atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, target capaian SPM tahun 2019 :

No.	Indikator	Target 2019 (SPM)	Target 2019 (PD)
1	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	81,77%	83,43%
2	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	60%	83%

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, indikator target untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kabupaten Pasuruan sampai dengan

tahun 2024 diharapkan dapat memenuhi Universal Akses 100% air bersih, 0% kawasan kumuh dan 100% penanganan sanitasi.

2.3.2 Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1) Masih adanya rumah tidak layak huni yang belum tertangani sebesar 5,51%.
2) Rendahnya penanganan kawasan kumuh.
   Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 663/864/HK/424.013/2021, lokasi perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Pasuruan meliputi 80 kawasan di 8 kecamatan dengan total luas 543,75 Ha. Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Pasuruan dimulai sejak tahun 2019 dengan total penanganan 19,77 Ha (3,64%), tahun 2020 dengan total penanganan 21,92 Ha (7,67%), tahun 2021 dengan total penanganan 32,82 Ha (13,70%) dan tahun 2022 dengan total penanganan 4,60 Ha (14,55%).
3) Pelaksanaan SPM Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman belum optimal.
4) Peningkatan dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana umum permukiman belum optimal.
5) Rendahnya kesadaran masyarakat, terutama di perdesaan Kabupaten Pasuruan untuk tidak BAB sembarangan.
6) Belum optimalnya pengamanan tanah aset Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
7) Belum optimalnya persetujuan penetapan lokasi pembangunan tanah aset Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Adapun permasalahan internal Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman maupun Pemerintah Kabupaten Pasuruan masih membutuhkan dukungan Sumber

Daya Manusia yang terampil dan handal dan juga sistem kerja stakeholder pendukung, sehingga tugas pekerjaan dapat diselesaikan dan tidak melebihi target waktu yang ditentukan;

2) Pengarsipan dalam penyimpanan dokumen yang kurang memadai.

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan pelayanan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah backlog perumahan dasar.

Sedangkan Peluang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pengembangan pelayanan terhadap masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Adanya dana desa dan dana kelurahan
2) Terbentuknya Forum Kabupaten Pasuruan Sehat
3) Dana hibah rumah swadaya masyarakat
4) Bantuan Keuangan Provinsi untuk penataan dan peningkatan kualitas kumuh serta perkotaan.

2.3.4 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

a. Pemenuhan Pelayanan SPM urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

b. Rehabilitasi rumah tidak layak huni

Rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah agar memiliki hunian yang layak. Adapun rumah tidak layak huni yang ditangani adalah rumah yang tidak memenuhi aspek kesehatan dan aspek keselamatan.

c. Ketersediaan infrastruktur dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana permukiman

Penyediaan infrastruktur dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman terus dilakukan. Diawali dengan pengumpulan data geospasial dari program-program yang telah dikerjakan. Selanjutnya dilakukan pemetaan sehingga bisa diketahui lokasi-lokasi yang masih membutuhkan pembangunan sarana dan prasarana dasarnya. Sarana dan prasarana ini meliputi jalan lingkungan, tembok penahan tanah dan drainase lingkungan

d. Peningkatan pengamanan tanah aset pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Peningkatan pengamanan tanah aset pemkab ini untuk meminimalisir adanya sengketa tanah terhadap aset Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Selain itu juga untuk membantu proses dari rencana pemerintah menuju Satu Data.

e. Peningkatan persetujuan penetapan lokasi pembangunan.

Percepatan peningkatan persetujuan penetapan lokasi pembangunan perlu dilakukan guna mendukung pembangunan di Kabupaten Pasuruan. Penetapan lokasi ini juga harus sesuai dengan kesesuaian dengan tata ruang wilayah. Jika tidak sesuai maka dampak negatif lingkungan yang akan terjadi, terutama perubahan iklim.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2018–2024 dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan rancangan awal RKPD tahun 2024.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja

program/kegiatan/Sub kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan/sub kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan/sub kegiatan untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.4
Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Dokumen/Laporan administrasi PD yang baik atau sesuai regulasi**	**100 %**	**9.008.461.037**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Dokumen/Laporan administrasi PD yang baik atau sesuai regulasi**	**100 %**	**9.008.461.037**	
1.1	*Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Kab. Pasuruan*	*Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi*	*100 %*	*50.000.000*	*Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Kab. Pasuruan*	*Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi*	*100 %*	*50.000.000*	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	27.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	27.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	23.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	23.000.000	
1.2	*Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Kab. Pasuruan*	*Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan*	*100 %*	*5.733.811.037*	*Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Kab. Pasuruan*	*Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan*	*100 %*	*5.733.811.037*	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 orang/bulan	5.658.811.037	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 orang/bulan	5.658.811.037	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	75.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	75.000.000	
1.3	*Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Kab. Pasuruan*	*Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan*	*100 Persentase*	*77.750.000*	*Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Kab. Pasuruan*	*Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan*	*100 Persentase*	*77.750.000*	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pasuruan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	27.750.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pasuruan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	27.750.000	
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50.000.000	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50.000.000	

1.4	*Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Kab. Pasuruan*	*Persentase pengadaan BMD yang terealisasi*	*100*	*%*	*600.000.000*	*Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Kab. Pasuruan*	*Persentase pengadaan BMD yang terealisasi*	*100*	*%*	*600.000.000*	
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	1	Unit	250.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	1	Unit	250.000.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20	Unit	350.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20	Unit	350.000.000	
1.5	*Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kab. Pasuruan*	*Persentase jasa penunjang opersional kantor yang tersedia*	*100*	*%*	*1.164.700.000*	*Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kab. Pasuruan*	*Persentase jasa penunjang opersional kantor yang tersedia*	*100*	*%*	*1.164.700.000*	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	2	Laporan	4.200.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	2	Laporan	4.200.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	370.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	370.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10	Laporan	790.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10	Laporan	790.500.000	
1.6	*Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kab. Pasuruan*	*Persentase BMD kondisi baik*	*100*	*%*	*680.500.000*	*Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kab. Pasuruan*	*Persentase BMD kondisi baik*	*100*	*%*	*680.500.000*	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34	Unit	500.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34	Unit	500.000.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Kab. Pasuruan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	70	Unit	6.100.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Kab. Pasuruan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	70	Unit	6.100.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeliharan / Direhabilitasi	2	Unit	99.900.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeliharan / Direhabilitasi	2	Unit	99.900.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	58	Unit	74.500.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	58	Unit	74.500.000	
1.7	*Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Kab. Pasuruan*	*Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD*	*100*	*%*	*701.700.000*	*Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Kab. Pasuruan*	*Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD*	*100*	*%*	*701.700.000*	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25	Paket	10.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25	Paket	10.500.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30	Paket	29.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30	Paket	29.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	49	Paket	82.200.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	49	Paket	82.200.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	Paket	35.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	Paket	35.000.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	40.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	40.000.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Laporan	505.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Laporan	505.000.000	

2	**Program Kawasan Permukiman**	**Kab. Pasuruan**	**Persentase pengurangan kawasan kumuh**	**23**	**Persentase**	**35.100.000.000**	**Program Kawasan Permukiman**	**Kab. Pasuruan**	**Persentase pengurangan kawasan kumuh**	**23**	**Persentase**	**35.100.000.000**	
2.1	*Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman*	*Kawasan Kumuh*	*Jumlah rekomendasi permohonan izin yang sesuai dengan RP2KP*	*1*	*Dokumen*	*500.000.000*	*Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman*	*Kawasan Kumuh*	*Jumlah rekomendasi permohonan izin yang sesuai dengan RP2KP*	*1*	*Dokumen*	*500.000.000*	
	Sub Kegiatan Penyusunan dan /atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Kawasan Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	4	Dokumen	400.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan dan /atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Kawasan Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	4	Dokumen	400.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Kawasan Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	12	Laporan	100.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Kawasan Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	12	Laporan	100.000.000	
2.2	*Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha*	*Kawasan Kumuh*	*Jumlah kawasan kumuh yang dikendalikan*	*5*	*Titik*	*200.000.000*	*Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha*	*Kawasan Kumuh*	*Jumlah kawasan kumuh yang dikendalikan*	*5*	*Titik*	*200.000.000*	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh	Kawasan Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	2	Dokumen	100.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh	Kawasan Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	2	Dokumen	100.000.000	
	Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Kawasan Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	3	Laporan	100.000.000	Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Kawasan Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	3	Laporan	100.000.000	
2.3	*Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha*	*Kawasan Kumuh*	*Luas permukiman kumuh yang ditangani secara tuntas*	*124*	*Ha*	*10.400.000.000*	*Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha*	*Kawasan Kumuh*	*Luas permukiman kumuh yang ditangani secara tuntas*	*124*	*Ha*	*34.400.000.000*	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Kawasan Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan / Pemugaran Permukiman Kumuh	2	Dokumen	200.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Kawasan Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan / Pemugaran Permukiman Kumuh	2	Dokumen	200.000.000	
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Kawasan Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	4	Dokumen	200.000.000	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Kawasan Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	4	Dokumen	200.000.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kawasan Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan / Dipugar	20	Ha	10.000.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kawasan Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan / Dipugar	20	Ha	10.000.000.000	
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang direhab	**52**	**%**	**24.000.000.000**			**Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang direhab**	**52**	**Persentase**	**24.000.000.000**	
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	1500	Unit Rumah	24.000.000.000	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	1500	Unit Rumah	24.000.000.000	
3	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**		**Persentase Penyediaan PSU di Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**3,95**	**%**	**10.400.000.000**	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**		**Persentase Penyediaan PSU di perumahan dan kawasan permukiman**	**4**	**Persentase**	**10.400.000.000**	
3.1	*Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*	Kab. Pasuruan	*Persentase Penyediaan PSU di Perumahan dan Kawasan Permukiman*	*3,95*	*%*	*10.400.000.000*	*Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*	Kab. Pasuruan	*Persentase Penyediaan PSU di Perumahan dan Kawasan Permukiman*	*3,95*	*%*	*10.400.000.000*	
	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5	Dokumen	200.000.000	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5	Dokumen	200.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	20	Lokasi	9.700.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	20	Lokasi	9.700.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	5	Laporan	200.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	5	Laporan	200.000.000	
	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	5	Laporan	300.000.000	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	5	Laporan	300.000.000	

4	**Program Pengembangan Perumahan**	**Kab. Pasuruan**	**Persentase tercapainya pengembangan perumahan**	**100**	**%**	**3.259.000.000**	**Program Pengembangan Perumahan**	**Kab. Pasuruan**	**Persentase tercapainya pengembangan perumahan**	**100**	**%**	**3.259.000.000**	
4.1	*Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	Kab. Pasuruan	*Jumlah dokumen data rumah korban bencana yang disediakan dan direhab atau di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota*	*2*	*Dokumen*	*381.000.000*	*Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	Kab. Pasuruan	*Jumlah dokumen data rumah korban bencana yang disediakan dan direhab atau di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota*	*2*	*Dokumen*	*581.000.000*	
	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	*2*	Dokumen	300.000.000	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	*2*	Dokumen	500.000.000	
	Sub kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	*4*	Dokumen	80.000.000	Sub kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	*4*	Dokumen	80.000.000	
	Sub kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1	Dokumen	1.000.000	Sub kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1	Dokumen	1.000.000	
4.2	*Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	Kab. Pasuruan	*Jumlah sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP yang dilakukan*	*1*	*kali*	*1.000.000*	*Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	Kab. Pasuruan	*Jumlah sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP yang dilakukan*	*1*	*kali*	*1.000.000*	
	Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Kab. Pasuruan	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	*10*	orang	1.000.000	Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Kab. Pasuruan	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	*10*	orang	1.000.000	
4.3	*Kegiatan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)*	Kab. Pasuruan	*Jumlah izin SKGB yang diterbitkan*	*5*	*Dokumen*	*1.000.000*	*Kegiatan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)*	Kab. Pasuruan	*Jumlah izin SKGB yang diterbitkan*	*5*	*Dokumen*	*1.000.000*	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	*5*	Laporan	1.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	*5*	Laporan	1.000.000	
4.4	*Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan*	Kab. Pasuruan	*Jumlah dokumen rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan*	*3*	*Dokumen*	*100.000.000*	*Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan*	Kab. Pasuruan	*Jumlah dokumen rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan*	*3*	*Dokumen*	*100.000.000*	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	3	Laporan	100.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	3	Laporan	100.000.000	
4.5	*Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	Kab. Pasuruan	*Prosentase Luas Pembangunan dan Rehabilitasi Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*100*	*%*	*2.776.000.000*	*Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	Kab. Pasuruan	*Prosentase Luas Pembangunan dan Rehabilitasi Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*100*	*%*	*2.576.000.000*	
	Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2	Dokumen	1.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2	Dokumen	1.000.000	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi	15	Unit Rumah	375.000.000	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi	15	Unit Rumah	375.000.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terbangun	5	Unit Rumah	2.400.000.000	Sub kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terbangun	5	Unit Rumah	2.200.000.000	

			Prosentase Pengelolaan Pertanahan	**63**	**%**				**Prosentase Pengelolaan Pertanahan**	**63**	**%**		
			Presentase Layanan Pertanahan Yang Baik	**61**	**%**				**Presentase Layanan Pertanahan Yang Baik**	**61**	**%**		
5	**Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum**		**Prosentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum**	**100**	**%**	**3.000.000.000**	**Program pengadaan tanah untuk kepentingan umum**		**Prosentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum**	**100**	**%**	**3.000.000.000**	
5.1	*Kegiatan koordinasi pengadaan tanah di wilayah propinsi*	Kab. Pasuruan	*Jumlah koordinasi pengadaan Tanah*	1	Berita Acara	3.000.000.000	*Kegiatan koordinasi pengadaan tanah di wilayah propinsi*	Kab. Pasuruan	*Jumlah koordinasi pengadaan Tanah*	1	Berita Acara	3.000.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah	Kab. Pasuruan	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah Berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)	1	Berita Acara	3.000.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah	Kab. Pasuruan	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah Berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)	1	Berita Acara	3.000.000.000	
6	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**		**Prosentase penyelesaian sengketa tanah garapan**	**100**	**%**	**50.000.000**	**Program penyelesaian sengketa tanah garapan**		**Prosentase penyelesaian sengketa tanah garapan**	**100**	**%**	**50.000.000**	
6.1	*Kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam kabupaten/kota*	Kab. Pasuruan	*Prosentase penyelesaian sengketa tanah garapan*	100	%	50.000.000	*Kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam kabupaten/kota*	Kab. Pasuruan	*Prosentase penyelesaian sengketa tanah garapan*	100	%	50.000.000	
	Sub Kegiatan Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Berita Acara	50.000.000	Sub Kegiatan Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Berita Acara	50.000.000	
7	**Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**		**Persentase masyarakat yg menerima ganti kerugian**	**100**	**%**	**2.000.000**	**Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**		**Persentase masyarakat yg menerima ganti kerugian**	**100**	**%**	**2.000.000**	
7.1	*Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	Kab. Pasuruan	*Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah*	*100*	**%**	*2.000.000*	*Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	Kab. Pasuruan	*Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah*	*100*	**%**	*2.000.000*	
	Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	2	Dokumen	1.000.000	Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	2	Dokumen	1.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1.000.000	
8	**Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**		**Persentase Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**	**100**	**%**	**4.000.000**	**Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**		**Persentase Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**	**100**	**%**	**4.000.000**	
8.1	*Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	Kab. Pasuruan	*Persentase Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum*	*100*	*%*	*2.000.000*	*Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	Kab. Pasuruan	*Persentase Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum*	*100*	*%*	*2.000.000*	
	Sub Kegiatan Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Kab. Pasuruan	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3	Dokumen	1.000.000	Sub Kegiatan Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Kab. Pasuruan	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3	Dokumen	1.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1	Dokumen	1.000.000	Sub kegiatan koordinasi penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1	Dokumen	1.000.000	

8.2	*Kegiatan penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota*	Kab. Pasuruan	*Persentase penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum*	*100*	*Persentase*	*2.000.000*	*Kegiatan penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota*	Kab. Pasuruan	*Persentase penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum*	*100*	*Persentase*	*2.000.000*	
	Sub Kegiatan Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1.000.000	Sub kegiatan inventarisasi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1.000.000	Sub kegiatan koordinasi penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1.000.000	
9	**Program Pengelolaan Tanah Kosong**		**Persentase tanah kosong yang termanfaatkan**	**100**	**%**	**100.000.000**	**Program Pengelolaan Tanah Kosong**		**Persentase tanah kosong yang termanfaatkan**	**100**	**%**	**100.000.000**	
9.1	*Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong*	Kab. Pasuruan	*Persentase tanah kosong yang termanfaatkan*	*100*	*%*	*1.000.000*	*Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong*	Kab. Pasuruan	*Persentase tanah kosong yang termanfaatkan*	*100*	*%*	*1.000.000*	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka penyelesaian Tanah Kosong	1	Laporan	1.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka penyelesaian Tanah Kosong	1	Laporan	1.000.000	
9.2	*Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong*	Kab. Pasuruan	*Akumulasi luas tanah kosong yang didata*	*21000*	*Ha*	*99.000.000*	*Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong*	Kab. Pasuruan	*Akumulasi luas tanah kosong yang didata*	*28000*	*Ha*	*99.000.000*	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota yang Diinventarisasi	3	Laporan	98.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota yang Diinventarisasi	3	Laporan	98.000.000	
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kosong	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1	Dokumen	1.000.000	Sub Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kosong	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1	Dokumen	1.000.000	
10	**Program Penatagunaan Tanah**		**Persentase tanah aset Pemda yang teridentifikasi perencanaan penggunaannya**	**44**	**%**	**400.000.000**	**Program Penatagunaan Tanah**		**Persentase tanah aset Pemda yang teridentifikasi perencanaan penggunaannya**	**44**	**%**	**400.000.000**	
10.1	*Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota*	Kab. Pasuruan	*Jumlah bidang tanah yang teridentifikasi perencanaan penggunaan tanah aset Pemda dan pelaksanaan konsolidasi tanah*	2886	bidang	400.000.000	*Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota*	Kab. Pasuruan	*Jumlah bidang tanah yang teridentifikasi perencanaan penggunaan tanah aset Pemda dan pelaksanaan konsolidasi tanah*	2886	bidang	400.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3	Laporan	300.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3	Laporan	300.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Dokumen	100.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Dokumen	100.000.000	
11	**Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah**		**Persentase Pemanfaatan Aset Pemda yang termanfaatkan**	**100**	**%**	**242.000.000**	**Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah**		**Persentase Pemanfaatan Aset Pemda yang termanfaatkan**	**100**	**%**	**242.000.000**	
11.1	*Kegiatan penerbitan Izin membuka Tanah*	Kab. Pasuruan	*Jumlah rekomendasi penerbitan Izin membuka Tanah*	2	rekomendasi	242.000.000	*Kegiatan penerbitan Izin membuka Tanah*	Kab. Pasuruan	*Jumlah rekomendasi penerbitan Izin membuka Tanah*	2	rekomendasi	242.000.000	
	Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara	2	Dokumen	242.000.000	Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara	2	Dokumen	242.000.000	

12	**Program Pengurusan Hak Hak Atas Tanah**		**Persentase Pengurusan Hak Atas Tanah**	**100**	**%**	**50.000.000**	**Program Pengurusan Hak Hak Atas Tanah**		**Persentase Pengurusan Hak Atas Tanah**	**100**	**%**	**50.000.000**	
12.1	*Kegiatan Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah*	Kab. Pasuruan	*Jumlah Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah*	*400*	*Kegiatan*	*50.000.000*	*Kegiatan Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah*	Kab. Pasuruan	*Jumlah Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah*	*400*	*Kegiatan*	*50.000.000*	
	Sub Kegiatan Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	Kab. Pasuruan	Jumlah Data Aset Pemerintah	4	Laporan	50.000.000	Sub Kegiatan Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	Kab. Pasuruan	Jumlah Data Aset Pemerintah	4	Laporan	50.000.000	
				JUMLAH		**61.615.461.037**				**JUMLAH**		**61.615.461.037**	

Pada tabel ini menunjukkan adanya kenaikan yang terjadi di beberapa sub kegiatan fisik. Hal ini dikarenakan adanya usulan kecamatan, usulan dinas dan pokir. Selain itu, kenaikan yang dibutuhkan dalam alokasi anggaran karena menyesuaikan pada pedoman pelaksanaan APBD dan standar harga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat yang berhubungan langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD terkait hasil maupun pengajuan Musrenbang Kabupaten, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPELITBANGDA.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, sehubungan dengan hal tersebut selanjutnya data tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan

	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(10)	(12)
1	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Kab. Pasuruan**	**Persentase pengurangan kawasan kumuh**	**22,82%**	
			Persentase rumah tidak layak huni yang direhab	**51,71%**	
1.1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Pasuruan	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara tuntas	124,11 Ha	
a	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	1500 Unit Rumah	
		Kec. Rejoso		21 Unit Rumah	
		Kec. Gempol		10 Unit Rumah	
		Kec. Grati		20 Unit Rumah	
		Kec. Lumbang		10 Unit Rumah	
		Kec. Kraton		30 Unit Rumah	
		Kec. Pohjentrek		10 Unit Rumah	
		Kec. Lekok		20 Unit Rumah	
		Kec. Bangil		23 Unit Rumah	
		Kec. Purwodadi		24 Unit Rumah	
		Kec. Tutur		60 Unit Rumah	
		Kec. Winongan		10 Unit Rumah	
		Kec. Pasrepan		65 Unit Rumah	
		Kec. Pandaan		18 Unit Rumah	
		Kec. Nguling		10 Unit Rumah	
		Kec. Wonorejo		10 Unit Rumah	

b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Permukiman Kumuh	Kawasan Kumuh	Luas permukiman kumuh yang dipugar	20 Ha	Kec. Purwosari, Kec. Kraton, Kec. Pohjentrek, Kec. Lekok, Kec. Rembang, Kec. Bangil, Kec. Beji
2	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Kab. Pasuruan**	**Persentase penyediaan PSU di perumahan dan kawasan permukiman**	**3,95%**	
2.1	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kab. Pasuruan	Persentase penyediaan PSU di perumahan dan kawasan permukiman	3,95%	
a	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Kab. Pasuruan	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menunjang fungsi hunian	5 Dokumen	Kec. Rejoso, Kec. Gempol, Kec. Purwosari, Kec. Lumbang, Kec. Kraton, Kec. Pohjentrek, Kec. Lekok, Rembang, Kec. Bangil, Kec. Beji, Kec. Purwodadi, Kec. Tutur, Kec. Winongan, Kec. Gondangwetan, Kec. Kejayan, Kec. Prigen, Kec. Sukorejo, Kec. Puspo, Kec. Pasrepan, Kec. Pandaan, Kec. Nguling, Kec. Wonorejo
3	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Kab. Pasuruan**	**Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan**	**100%**	
3.1	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	100%	
a	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 Berita Acara	Kec. Puspo

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menguraikan kebijakan nasional berupa arah bidang Perumahan dan Permukiman menurut PP No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (RPJMN), maupun yang dirumuskan dalam RKP (Rancangan Awal). Di samping juga berpedoman pada tujuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan SDGs maka prioritas dan sasaran pembangunan yang terkait dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Pasuruan bidang Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut :

1. Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*)

   Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun, yaitu dengan meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau, melalui :

   a. Peningkatan pemenuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),
   b. Peningkatan akses bagi masyarakat berpenghasilan menengah/bawah terhadap hunian yang layak dan terjangkau,
   c. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman,
   d. Peningkatan jaminan kepastian hukum dalam bermukim (*secure tenure*),
   e. Peningkatan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman kumuh.

2. Air bersih dan sanitasi (*Clean water and sanitation*)

   Menjamin ketersediaan, dan pengelolaan air bersih, serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang yaitu dengan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan air minum dan sanitasi yang memadai, melalui :

   a. menyediakan perangkat peraturan di tingkat Pusat dan/atau Daerah untuk mendukung pelayanan air minum, air limbah dan persampahan,
   b. Peningkatan prioritas pembangunan prasarana dan sarana permukiman (air minum dan sanitasi),
   c. Peningkatan kinerja manajemen penyelenggaraan air minum, penanganan air limbah, dan pengelolaan persampahan,

d. Peningkatan sistem perencanaan pembangunan air minum dan sanitasi
e. Peningkatan cakupan pelayanan air minum, air limbah, persampahan dan drainase
f. Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
g. mengembangkan alternatif sumber pendanaan bagi pembangunan air minum, air limbah dan persampahan
h. meningkatkan keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan.

Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan sedapat mungkin selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Kebijakan (umum) Kepala Dinas yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan terkait penanganan rehabilitasi rumah korban bencana Kabupaten dan relokasi akibat program Kabupaten/Kota;
2. Pengurangan kawasan kumuh sesuai dengan SK Kumuh yang telah ditetapkan;
3. Pengurangan rumah tidak layak huni;
4. Pemerataan pembangunan di permukiman;
5. Pengamaanan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu hinga 3 (tiga) tahun ke depan. Dalam menentukan tujuan dan sasaran, maka perlu penyelarasan dengan tujuan dan sasaran RPD.

Tujuan dari RPD Tahun 2024 - 2026 yaitu **:**

1- Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah
2- Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat
3- Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Pelayanan Prima Berbasis Teknologi Informasi

Untuk menjabarkan serta mewujudkan tujuan dan sasaran RPD, maka disusun tujuan dan sasaran renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tujuan jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1- Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman, dengan Indikator Tujuan Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman.
2- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Tanah, dengan Indikator Tujuan Prosentase Pengelolaan Pertanahan.

b. Sasaran

Berdasarkan tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diatas, ditetapkan sasaran Perangkat Daerah, yaitu :

1- Meningkatnya Kualitas Infrastuktur Perumahan dan Permukiman, dengan indikator persentase sarana prasarana dasar di perumahan dan permukiman dalam kondisi baik;
2- Meningkatnya Kualitas Layanan Pertanahan, dengan indikator persentase layanan pertanahan yang baik;
3- Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator nilai SAKIP Perangkat Daerah.

c. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar urusan pemerintahan dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. SPM yang diampu oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ada 2 macam yaitu:

a- Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu :

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten.

Pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam hal ini, salah satu tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara memadai. Sedangkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam hal pelayanan SPM ini dalam kegiatan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten (Pasca Bencana) ini hingga tahun 2022 belum terlaksana. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih membutuhkan bantuan yang sifatnya cepat tanggap sehingga jika ada kerusakan rumah akibat korban bencana ditangani dengan pemberian stimulan dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Bantuan stimulan yang diberikan kepada korban bencana dilakukan dengan mekanisme berikut :

1- Tim bencana melakukan survey bencana terhadap rumah korban bencana,
2- Membuat RAB rehabilitasi rumah korban bencana,
3- Kriteria kerusakan rumah korban bencana dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu ringan, sedang dan berat dan disesuaikan dengan RAB yang telah dibuat,
4- Setelah ditentukan kriteria kerusakan lalu diterbitkan SK Bupati Pasuruan tentang lokasi dan alokasi bantuan soaial kepada masyarakat kibat bencana alam di Kabupaten Pasuruan melalui anggaran Bantuan Tidak Terduga.
5- Pemberian stimulan sesuai SK Bupati yang telah ditetapkan , maksimal 2 (dua) minggu setelah bencana terjadi.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan rehabilitasi pasca bencana untuk sarana dan prasarana utilitas umum yang mengalami kerusakan. Diantarahanya rehabilitasi tembok penahan tanah untuk daerah korban longsor.

- Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten.

  Untuk pelayanan SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Kabupaten hingga tahun 2022 belum dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hal ini dikarenakan belum adanya rencana program kabupaten yang memerlukan relokasi sehingga kegiatan ini belum bisa dimanfaatkan dengan optimal.

b- Urusan Pekerjaan Umum yaitu :

Untuk pengampu utama SPM di bidang pekerjaan umum adalah Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang. Karena Pembangunan jaringan infrastruktur air minum dan sanitasi menjadi tupoksi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang. Namun untuk pembangunan di wilayah permukiman yang aksesnya langsung ke masyarakat diampu oleh Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman.

SPM yang diampu oleh Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman ada pada kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari untuk pelayanan SPAM bukan jaringan perpipaan. Kegiatan ini disebut juga Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP).

  Capaian penyediaan pelayanan SPAM bukan jaringan perpipaan hingga tahun 2022 mencapai 35,36%.

- Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik di kawasan permukiman.

  Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik di permukiman yaitu dengan cara pembangunan jamban sehat keluarga dan pembangunan MCK di permukiman. Capaian penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik hingga tahun 2022 mencapai 17,37%.

Adapun tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Proyeksi 2023	Target 2024
Tujuan 1 :				
Meningkatnya Pelayanan Infrastuktur Perumahan dan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	44,46%	46,21%	47,96%
Sasaran :		-		
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Persentase Sarana Prasarana Dasar di Perumahan dan Permukiman dalam kondisi baik	44,83%	46,58%	48,33%
Tujuan 2 :				
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pertanahan	Persentase Pengelolaan Pertanahan	60,46%	61,05%	62,83%
Sasaran :				
Meningkatnya Kualitas Layanan Pertanahan	Persentase Layanan Pertanahan yang Baik	56,58%	57,48%	60,99%
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	82,36	82,86	83,25
	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Standar Pelayanan Minimal & Indikator Kinerja Kunci	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	100%	100%	100%
Standar Pelayanan Minimal & Indikator Kinerja Kunci	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/ Kota	0%	0%	0%
Indikator Kinerja Kunci	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten/ Kota yang Ditangani	14,75%	17,51%	21,19%
Indikator Kinerja Kunci	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	5,55%	5,21%	4,87%
Indikator Kinerja Kunci	Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	100%	100%	100%
	Bidang Pertanahan			
Indikator Kinerja Kunci	Persentase Pemanfaatan Tanah yang sesuai dengan Peruntukkan Tanahnya Diatas Izin Lokasi Dibandingkan dengan Luas Izin Lokasi yang Diterbitkan	0%	0%	0%
Indikator Kinerja Kunci	Persentase Penetapan Tanah untuk Pembanguna Fasilitas Umum	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Kunci	Tersedianya Lokasi Pembangunan dalam rangka Penanaman Modal	0%	100%	100%
Indikator Kinerja Kunci	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Bersal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100%	100%	100%
Indikator Kinerja Kunci	Tersedianya Tanah untuk Masyarakat	0%	0%	0%
Indikator Kinerja Kunci	Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi	0%	100%	100%

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, antara lain :

- Pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yaitu kebijaksanaan dalam pengendalian serta pengawasan di bidang Perumahan Rakyat;
- Pencapaian Universal Akses dan SPM sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Pengentasan kemiskinan dengan cara peningkatan kualitas permukiman kumuh dan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat;
- Pendayagunaan potensi peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

b. Rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan :

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

1 *Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

2 *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3 *Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

4 *Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

5 *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6 *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
- Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7 *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

II Program Kawasan Permukiman

1 *Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman*

- Sub Kegiatan Penyusunan dan /atau Review serta Legalisasi

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh

2 *Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha*

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh
- Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh

3 *Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha*

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
- Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh
- Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Urusan Pemerintahan Wajib

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

II Program Kawasan Permukiman

1 *Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman*

- Sub Kegiatan Penyusunan dan /atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh

2 *Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha*

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh
- Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh

3 *Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha*

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
- Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh
- Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

III Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

1 *Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*

- Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
- Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
- Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang

IV Program Pengembangan Perumahan

1 *Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*

- Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
- Sub kegiata Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota

2 *Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*

- Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP

3 *Kegiatan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)*

- Sub Kegiatan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)

4 *Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan*

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

5 *Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*

- Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
- Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

V Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

1 *Kegiatan Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Propinsi*

- Sub Kegiatan Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah

VI Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

1 *Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota*

- Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

VII Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

1 *Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*

- Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

VIII Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

1 *Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*

- Sub Kegiatan Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah
- Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

2 *Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*

- Sub Kegiatan Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

IX Program Pengelolaan Tanah Kosong

1 *Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong*

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2 *Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong*

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
- Sub Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kosong

X Program Penatagunaan Tanah

1 *Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota*

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

XI Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

1 *Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah*

- Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara

XII Program Pengurusan Hak Hak Atas Tanah

1 *Kegiatan Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah*

- Sub Kegiatan Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah

- Lokasi program dan kegiatan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas kegiatan yang direncanakan ada 12 (dua belas) Program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan dan 58 (lima puluh delapan) sub kegiatan.
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan adalah sebesar:

Dana DAU	: Rp.	55.615.461.037,00
Dana DAK	: Rp	0,00
Dana DBHCHT	: Rp	6.000.000.000,00
Dana DID	: Rp	0,00
Total	**: Rp.**	**61.615.461.037,00**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan tahun 2024 ada 3 (tiga) yaitu Meningkatnya Kualitas Infrastuktur Perumahan dan Permukiman, Meningkatnya Kualitas Layanan Pertanahan dan Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah.

Untuk Rencana Kerja yang pertama yaitu Meningkatnya Kualitas Infrastuktur Perumahan dan Permukiman, dalam hal ini meliputi 4 (empat) penanganan yaitu :

a) Pemenuhan Pelayanan SPM urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
b) Universal akses 100.0.100 yang harus dicapai di tahun 2030;
c) Percepatan penurunan angka backlog perumahan;
d) Ketersediaan infrastruktur dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana permukiman.

Untuk penanganan tersebut di atas diampu oleh 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU). Indikator sasaran yaitu Persentase Sarana Prasarana Dasar di Perumahan dan Permukiman dalam kondisi baik dengan target 48,33%.

Rencana Kerja yang kedua yaitu Meningkatnya Kualitas Layanan Pertanahan. Dalam hal ini diampu oleh bidang Pertanahan menggunakan indikator sasaran Persentase Layanan Pertanahan yang Baik dengan target persentase 60,99%. Rencana kerja yang terakhir yaitu Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target nilai 83,25.

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 yaitu “Peningkatan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola Pemerintahan”. Arah kebijakan tersebut merupakan panduan pelaksanaan tahunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), untuk itu setiap tahun juga disusun proyek strategis sebagai sebuah akselerasi pencapaian nyata dari arah kebijakan tahunan. Adapun proyek strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan yang mendukung proyek strategis pembangunan daerah yaitu :

a) Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan AKI-AKB;

b) Penambahan 20 Desa ODF; dan
c) Penataan dan revitalisasi permukiman kumuh seluas 20 Ha.

Penataan dan revitalisasi permukiman kumuh seluas 20 Ha rencananya akan dilakukan di Desa Tambak Lekok Kecamatan Lekok. Kecamatan Lekok masuk dalam kategori Kumuh Sedang, dengan luas kumuh 37,83 Ha. Kondisi kumuh di Kecamatan Lekok saat ini :

- Rawan abrasi dan gelombang pasang
- Kondisi Pasar Lekok dan lingkungan sekitarnya yang tidak tertata
- Tingginya ketidakteraturan dan kepadatan bangunan
- Akses mendapatkan air minum berkualitas cukup terbatas
- Kualitas konstruksi drainase buruk
- Beberapa saluran drainase tidak berfungsi
- Masih ada yang BAB di sungai
- Minimnya sarana persampahan dan pengelolaan persampahan
- Masyarakat masih membuang sampah ke sungai dan laut
- Minimnya sarpras proteksi kebakaran

Adapun memilih Desa Tambak Lekok sebagai kawasan proyek strategis dikarenakan :

- Guna pemerataan pembangunan antara wilayah barat dan wilayah timur agar tidak terjadi ketimpangan baik dari segi kemajuan infrastruktur maupun sumber daya manusianya.
- Untuk pengembangan wilayah pesisir pantai, yang mana di daerah tersebut terdapat kawasan mangrove, kampung nelayan dan pasar lelang ikan, pelabuhan dan peternakan sapi perah.

Dengan adanya penataan dan revitalisasi permukiman kumuh di Desa Tambak Lekok maka akan terbentuk suatu kawasan terintegrasi mulai dari penghasil perikanan, peternakan sampai dengan pariwisata, sehingga bisa terbentuk suatu kawasan permukiman yang bersih, sehat, layak dan teratur, dan juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun, proyek strategis ini akan dapat diwujudkan dengan baik tentunya dengan dukungan dan kerjasama dari Perangkat Daerah lainnya seperti Dinas Sumber Daya Alam, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, serta Dinas Bina

Marga dan Bina Konsttuksi, dimana masing-masing Perangkat Daerah menjalankan peran sesuai peran dan fungsinya.

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD tahun 2024 – 2026 diupayakan melalui strategi dan arah kebijakan dan direpresentasikan melalui program strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Program prioritas tersebut yaitu :

a) Program Kawasan Permukiman
   - Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
     - Sub Kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
     - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
   - Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
     - Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
     - Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh
     - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
     - Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

b) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
   - Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
     - Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

c) Program Pengembangan Perumahan
   - Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
     - Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota

- Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

4.2 Pendanaan

Pendanaan Rencana Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman tahun 2024 adalah dari APBD sebagai berikut :

a. DAU	: Rp	55.615.461.037,00
b. DAK	: Rp	-
c. DBHCHT	: Rp	6.000.000.000,00
d. DID	: Rp	-
Total	**: Rp**	**61.615.461.037,00**

Adapun rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025 Kabupaten Pasuruan terlampir pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase dokumen/ laporan administrasi PD yang baik atau sesuai regulasi**	**Kab. Pasuruan**	**100%**	**9.008.461.037,00**				**Rp 9.008.461.037**
	1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan pada dokumen rencana, anggaran dan evaluasi	Kab. Pasuruan	100%	50.000.000,00			100%	Rp 50.000.000
	a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	9 Dokumen	Rp 27.000.000	DAU		9 Dokumen	Rp 27.000.000
					Belanja operasi : Rp 27.000.000				
					Belanja pegawai :				
					Belanja barang dan jasa : Rp 27.000.000				
					Belanja bunga :				
					Belanja subsidi :				
					Belanja hibah :				
					Belanja bantuan :				
					Belanja modal :				
					Belanja tidak terduga :				
					Belanja transfer :				
	b Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Pasuruan	2 Dokumen	Rp 23.000.000	DAU		2 Dokumen	Rp 23.000.000
					Belanja operasi : Rp 23.000.000				
					Belanja pegawai :				
					Belanja barang dan jasa : Rp 23.000.000				
					Belanja bunga :				
					Belanja subsidi :				
					Belanja hibah :				
					Belanja bantuan :				
					Belanja modal :				
					Belanja tidak terduga :				
					Belanja transfer :				
	1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	Kab. Pasuruan	100%	Rp 5.733.811.037			100%	Rp 5.733.811.037
	a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	42 Orang / Bulan	Rp 5.658.811.037	DAU		42 Orang / Bulan	Rp 5.658.811.037
					Belanja operasi : Rp 5.658.811.037				
					Belanja pegawai : Rp 5.658.811.037				
					Belanja barang dan jasa :				
					Belanja bunga :				
					Belanja subsidi :				
					Belanja hibah :				
					Belanja bantuan :				
					Belanja modal :				
					Belanja tidak terduga :				
					Belanja transfer :				

	b	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Kab. Pasuruan	18 Laporan		Rp 75.000.000	DAU		18 Laporan	Rp 75.000.000
						Belanja operasi :	Rp 75.000.000				
						Belanja pegawai :					
						Belanja barang dan jasa :	Rp 75.000.000				
						Belanja bunga :					
						Belanja subsidi :					
						Belanja hibah :					
						Belanja bantuan :					
						Belanja modal :					
						Belanja tidak terduga :					
						Belanja transfer :					
	1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	Kab. Pasuruan	100%		Rp 77.750.000			100%	Rp 77.750.000
	a	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Pasuruan	4 Orang		Rp 27.750.000	DAU		4 Orang	Rp 27.750.000
						Belanja operasi :	Rp 27.750.000				
						Belanja pegawai :					
						Belanja barang dan jasa :	Rp 27.750.000				
						Belanja bunga :					
						Belanja subsidi :					
						Belanja hibah :					
						Belanja bantuan :					
						Belanja modal :					
						Belanja tidak terduga :					
						Belanja transfer :					
	b	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kab. Pasuruan	50 Orang		Rp 50.000.000	DAU		50 Orang	Rp 50.000.000
						Belanja operasi :	Rp 50.000.000				
						Belanja pegawai :					
						Belanja barang dan jasa :	Rp 50.000.000				
						Belanja bunga :					
						Belanja subsidi :					
						Belanja hibah :					
						Belanja bantuan :					
						Belanja modal :					
						Belanja tidak terduga :					
						Belanja transfer :					
	1.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	Kab. Pasuruan	100%		Rp 600.000.000			100%	Rp 600.000.000
	a	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Pasuruan	1 unit		Rp 250.000.000	DAU		1 unit	Rp 250.000.000
						Belanja operasi :	Rp 250.000.000				
						Belanja pegawai :					
						Belanja barang dan jasa :	Rp 250.000.000				
						Belanja bunga :					
						Belanja subsidi :					
						Belanja hibah :					
						Belanja bantuan :					
						Belanja modal :					
						Belanja tidak terduga :					
						Belanja transfer :					

	b	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kab. Pasuruan	20 unit		Rp 350.000.000	DAU		20 unit	Rp 350.000.000
						Belanja operasi	: Rp 350.000.000				
						Belanja pegawai	:				
						Belanja barang dan jasa	: Rp 350.000.000				
						Belanja bunga	:				
						Belanja subsidi	:				
						Belanja hibah	:				
						Belanja bantuan	:				
						Belanja modal	:				
						Belanja tidak terduga	:				
						Belanja transfer	:				
	1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	Kab. Pasuruan	100%		Rp 1.164.700.000	DAU		100%	Rp 1.164.700.000
	a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Kab. Pasuruan	2 Laporan		Rp 4.200.000	DAU		2 Laporan	Rp 4.200.000
						Belanja operasi	: Rp 4.200.000				
						Belanja pegawai	:				
						Belanja barang dan jasa	: Rp 4.200.000				
						Belanja bunga	:				
						Belanja subsidi	:				
						Belanja hibah	:				
						Belanja bantuan	:				
						Belanja modal	:				
						Belanja tidak terduga	:				
						Belanja transfer	:				
	b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Pasuruan	36 Laporan		Rp 370.000.000	DAU		36 Laporan	Rp 370.000.000
						Belanja operasi	: Rp 370.000.000				
						Belanja pegawai	:				
						Belanja barang dan jasa	: Rp 370.000.000				
						Belanja bunga	:				
						Belanja subsidi	:				
						Belanja hibah	:				
						Belanja bantuan	:				
						Belanja modal	:				
						Belanja tidak terduga	:				
						Belanja transfer	:				
	c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Pasuruan	10 Laporan		Rp 790.500.000	DAU		10 Laporan	Rp 790.500.000
						Belanja operasi	: Rp 790.500.000				
						Belanja pegawai	:				
						Belanja barang dan jasa	: Rp 790.500.000				
						Belanja bunga	:				
						Belanja subsidi	:				
						Belanja hibah	:				
						Belanja bantuan	:				
						Belanja modal	:				
						Belanja tidak terduga	:				
						Belanja transfer	:				

	1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	Kab. Pasuruan	100%		Rp	680.500.000			100%	Rp 680.500.000
	a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Pasuruan	34 Unit		Rp	500.000.000	DAU		34 Unit	Rp 500.000.000
						Belanja operasi	: Rp	500.000.000				
						Belanja pegawai	:					
						Belanja barang dan jasa	: Rp	500.000.000				
						Belanja bunga	:					
						Belanja subsidi	:					
						Belanja hibah	:					
						Belanja bantuan	:					
						Belanja modal	:					
						Belanja tidak terduga	:					
						Belanja transfer	:					
	b	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Kab. Pasuruan	70 Unit		Rp	6.100.000	DAU		70 Unit	Rp 6.100.000
						Belanja operasi	: Rp	6.100.000				
						Belanja pegawai	:					
						Belanja barang dan jasa	: Rp	6.100.000				
						Belanja bunga	:					
						Belanja subsidi	:					
						Belanja hibah	:					
						Belanja bantuan	:					
						Belanja modal	:					
						Belanja tidak terduga	:					
						Belanja transfer	:					
	c	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kab. Pasuruan	2 Unit		Rp	99.900.000	DAU		2 Unit	Rp 99.900.000
						Belanja operasi	: Rp	99.900.000				
						Belanja pegawai	:					
						Belanja barang dan jasa	: Rp	99.900.000				
						Belanja bunga	:					
						Belanja subsidi	:					
						Belanja hibah	:					
						Belanja bantuan	:					
						Belanja modal	:					
						Belanja tidak terduga	:					
						Belanja transfer	:					
	d	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kab. Pasuruan	58 Unit		Rp	74.500.000	DAU		58 Unit	Rp 74.500.000
						Belanja operasi	: Rp	74.500.000				
						Belanja pegawai	:					
						Belanja barang dan jasa	: Rp	74.500.000				
						Belanja bunga	:					
						Belanja subsidi	:					
						Belanja hibah	:					
						Belanja bantuan	:					
						Belanja modal	:					
						Belanja tidak terduga	:					
						Belanja transfer	:					

	1.7	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	Kab. Pasuruan	100%		Rp 701.700.000			100%	Rp 701.700.000
	a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Pasuruan	25 Paket		Rp 10.500.000	DAU		25 Paket	Rp 10.500.000
						Belanja operasi	: Rp 10.500.000				
						Belanja pegawai	:				
						Belanja barang dan jasa	: Rp 10.500.000				
						Belanja bunga	:				
						Belanja subsidi	:				
						Belanja hibah	:				
						Belanja bantuan	:				
						Belanja modal	:				
						Belanja tidak terduga	:				
						Belanja transfer	:				
	b	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Pasuruan	30 Paket		Rp 29.000.000	DAU		30 Paket	Rp 29.000.000
						Belanja operasi	: Rp 29.000.000				
						Belanja pegawai	:				
						Belanja barang dan jasa	: Rp 29.000.000				
						Belanja bunga	:				
						Belanja subsidi	:				
						Belanja hibah	:				
						Belanja bantuan	:				
						Belanja modal	:				
						Belanja tidak terduga	:				
						Belanja transfer	:				
	c	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kab. Pasuruan	49 Paket		Rp 82.200.000	DAU		49 Paket	Rp 82.200.000
						Belanja operasi	: Rp 82.200.000				
						Belanja pegawai	:				
						Belanja barang dan jasa	: Rp 82.200.000				
						Belanja bunga	:				
						Belanja subsidi	:				
						Belanja hibah	:				
						Belanja bantuan	:				
						Belanja modal	:				
						Belanja tidak terduga	:				
						Belanja transfer	:				
	d	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Pasuruan	20 Paket		Rp 35.000.000	DAU		20 Paket	Rp 35.000.000
						Belanja operasi	: Rp 35.000.000				
						Belanja pegawai	:				
						Belanja barang dan jasa	: Rp 35.000.000				
						Belanja bunga	:				
						Belanja subsidi	:				
						Belanja hibah	:				
						Belanja bantuan	:				
						Belanja modal	:				
						Belanja tidak terduga	:				
						Belanja transfer	:				

	e	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Pasuruan	12 Laporan	Rp 40.000.000	DAU		12 Laporan	Rp 40.000.000
						Belanja operasi : Rp 40.000.000				
						Belanja pegawai :				
						Belanja barang dan jasa : Rp 40.000.000				
						Belanja bunga :				
						Belanja subsidi :				
						Belanja hibah :				
						Belanja bantuan :				
						Belanja modal :				
						Belanja tidak terduga :				
						Belanja transfer :				
	f	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Pasuruan	50 Laporan	Rp 505.000.000	DAU		50 Laporan	Rp 505.000.000
						Belanja operasi : Rp 505.000.000				
						Belanja pegawai :				
						Belanja barang dan jasa : Rp 505.000.000				
						Belanja bunga :				
						Belanja subsidi :				
						Belanja hibah :				
						Belanja bantuan :				
						Belanja modal :				
						Belanja tidak terduga :				
						Belanja transfer :				
	2	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase pengurangan kawasan kumuh**	**Kawasan Kumuh**	**22,82%**	**Rp 11.100.000.000**			**22,82%**	**Rp 11.100.000.000**
	2.1	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah rekomendasi permohonan izin yang sesuai dengan RP2KP	Kawasan Kumuh	1 Dokumen	Rp 500.000.000			1 Dokumen	Rp 500.000.000
	a	Sub Kegiatan Penyusunan dan /atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang tersusun dan/atau tereview serta terlegalisasi	Kawasan Kumuh	4 Dokumen	Rp 400.000.000	DAU		4 Dokumen	Rp 400.000.000
						Belanja operasi : Rp 400.000.000				
						Belanja pegawai :				
						Belanja barang dan jasa : Rp 400.000.000				
						Belanja bunga :				
						Belanja subsidi :				
						Belanja hibah :				
						Belanja bantuan :				
						Belanja modal :				
						Belanja tidak terduga :				
						Belanja transfer :				
	b	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	Kawasan Kumuh	12 Laporan	Rp 100.000.000	DAU		12 Laporan	Rp 100.000.000
						Belanja operasi : Rp 100.000.000				
						Belanja pegawai :				
						Belanja barang dan jasa : Rp 100.000.000				
						Belanja bunga :				
						Belanja subsidi :				
						Belanja hibah :				
						Belanja bantuan :				
						Belanja modal :				
						Belanja tidak terduga :				
						Belanja transfer :				
	2.2	Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah kawasan kumuh yang dikendalikan	Kawasan Kumuh	5 Titik	Rp 200.000.000			5 Titik	Rp 200.000.000
	a	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh	Jumlah dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Kawasan Kumuh	2 Dokumen	Rp 100.000.000	DAU		2 Dokumen	Rp 100.000.000
						Belanja operasi : Rp 100.000.000				
						Belanja pegawai :				
						Belanja barang dan jasa : Rp 100.000.000				
						Belanja bunga :				
						Belanja subsidi :				
						Belanja hibah :				
						Belanja bantuan :				
						Belanja modal :				
						Belanja tidak terduga :				
						Belanja transfer :				

b	Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah laporan pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh	Kawasan Kumuh	3 laporan		Rp 100.000.000	DAU		3 laporan	Rp 100.000.000
					Belanja operasi	: Rp 100.000.000				
					Belanja pegawai	:				
					Belanja barang dan jasa	: Rp 100.000.000				
					Belanja bunga	:				
					Belanja subsidi	:				
					Belanja hibah	:				
					Belanja bantuan	:				
					Belanja modal	:				
					Belanja tidak terduga	:				
					Belanja transfer	:				
2.3	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara tuntas	Kawasan Kumuh	124,11 Ha		Rp 10.400.000.000			124,11 Ha	Rp 10.400.000.000
a	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan / Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	Kawasan Kumuh	2 Dokumen		Rp 200.000.000	DAU		2 Dokumen	Rp 200.000.000
					Belanja operasi	: Rp 200.000.000				
					Belanja pegawai	:				
					Belanja barang dan jasa	: Rp 200.000.000				
					Belanja bunga	:				
					Belanja subsidi	:				
					Belanja hibah	:				
					Belanja bantuan	:				
					Belanja modal	:				
					Belanja tidak terduga	:				
					Belanja transfer	:				
b	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen data permukiman kumuh yang terverifikasi	Kawasan Kumuh	4 Dokumen		Rp 200.000.000	DAU		4 Dokumen	Rp 200.000.000
					Belanja operasi	: Rp 200.000.000				
					Belanja pegawai	:				
					Belanja barang dan jasa	: Rp 200.000.000				
					Belanja bunga	:				
					Belanja subsidi	:				
					Belanja hibah	:				
					Belanja bantuan	:				
					Belanja modal	:				
					Belanja tidak terduga	:				
					Belanja transfer	:				
c	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas permukiman kumuh yang diremajakan/ dipugar	Kawasan Kumuh	20 Ha		Rp 10.000.000.000	DAU, DBHCHT		20 Ha	Rp 10.000.000.000
					Belanja operasi	: Rp 10.000.000.000				
					Belanja pegawai	:				
					Belanja barang dan jasa	: Rp 10.000.000.000				
					Belanja bunga	:				
					Belanja subsidi	:				
					Belanja hibah	:				
					Belanja bantuan	:				
					Belanja modal	:				
					Belanja tidak terduga	:				
					Belanja transfer	:				
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Direhab		**51,71%**		**Rp 24.000.000.000**			**51,71%**	**Rp 24.000.000.000**
d	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	Kawasan Kumuh	1.500 Unit Rumah		Rp 24.000.000.000	DAU, DBHCHT		1.500 Unit Rumah	Rp 24.000.000.000
					Belanja operasi	: Rp 24.000.000.000				
					Belanja pegawai	:				
					Belanja barang dan jasa	: Rp 24.000.000.000				
					Belanja bunga	:				
					Belanja subsidi	:				
					Belanja hibah	:				
					Belanja bantuan	:				
					Belanja modal	:				
					Belanja tidak terduga	:				
					Belanja transfer	:				

	3	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Penyediaan PSU di Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**Kab. Pasuruan**	**3,95%**		**Rp 10.400.000.000**			**3,95%**	**Rp 10.400.000.000**
	3.1	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Penyediaan PSU di Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Pasuruan	3,95%		Rp 10.400.000.000			3,95%	Rp 10.400.000.000
	a	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU perumahan	Kab. Pasuruan	5 Dokumen		Rp 200.000.000	DAU		5 Dokumen	Rp 200.000.000
						Belanja operasi	: Rp 200.000.000				
						Belanja pegawai	:				
						Belanja barang dan jasa	: Rp 200.000.000				
						Belanja bunga	:				
						Belanja subsidi	:				
						Belanja hibah	:				
						Belanja bantuan	:				
						Belanja modal	:				
						Belanja tidak terduga	:				
						Belanja transfer	:				
	b	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menunjang fungsi hunian	Kab. Pasuruan	20 Lokasi		Rp 9.700.000.000	DAU, DBHCHT		20 Lokasi	Rp 9.700.000.000
						Belanja operasi	: Rp 9.700.000.000				
						Belanja pegawai	:				
						Belanja barang dan jasa	: Rp 9.700.000.000				
						Belanja bunga	:				
						Belanja subsidi	:				
						Belanja hibah	:				
						Belanja bantuan	:				
						Belanja modal	:				
						Belanja tidak terduga	:				
						Belanja transfer	:				
	c	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kab. Pasuruan	5 Laporan		Rp 200.000.000	DAU		5 Laporan	Rp 200.000.000
						Belanja operasi	: Rp 200.000.000				
						Belanja pegawai	:				
						Belanja barang dan jasa	: Rp 200.000.000				
						Belanja bunga	:				
						Belanja subsidi	:				
						Belanja hibah	:				
						Belanja bantuan	:				
						Belanja modal	:				
						Belanja tidak terduga	:				
						Belanja transfer	:				
	d	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah laporan hasil serah terima PSU Perumahan yang terverifikasi dari pengembang	Kab. Pasuruan	5 Laporan		Rp 300.000.000	DAU		5 Laporan	Rp 300.000.000
						Belanja operasi	: Rp 300.000.000				
						Belanja pegawai	:				
						Belanja barang dan jasa	: Rp 300.000.000				
						Belanja bunga	:				
						Belanja subsidi	:				
						Belanja hibah	:				
						Belanja bantuan	:				
						Belanja modal	:				
						Belanja tidak terduga	:				
						Belanja transfer	:				

	4	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Tercapainya Pengembangan Perumahan**	**Kab. Pasuruan**	**100%**		**Rp 3.259.000.000**			**100%**	**Rp 3.259.000.000**
	4.1	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah korban bencana yang disediakan dan direhab atau di lokasi yang berpotensi terkenan relokasi program kabupaten/ kota	Kab. Pasuruan	2 Dokumen		*Rp 581.000.000*			2 Dokumen	Rp 581.000.000
	a	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/ kota	Kab. Pasuruan	2 Dokumen		Rp 500.000.000	DAU		2 Dokumen	Rp 500.000.000
						Belanja operasi	: Rp 500.000.000				
						Belanja pegawai	:				
						Belanja barang dan jasa	: Rp 500.000.000				
						Belanja bunga	:				
						Belanja subsidi	:				
						Belanja hibah	:				
						Belanja bantuan	:				
						Belanja modal	:				
						Belanja tidak terduga	:				
						Belanja transfer	:				
	b	Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah dokumen data rumah yang terkena bencana Kabupaten/ Kota berdasarkan tingkat kerusakan rumah	Kab. Pasuruan	4 Dokumen		Rp 80.000.000	DAU		4 Dokumen	Rp 80.000.000
						Belanja operasi	: Rp 80.000.000				
						Belanja pegawai	:				
						Belanja barang dan jasa	: Rp 80.000.000				
						Belanja bunga	:				
						Belanja subsidi	:				
						Belanja hibah	:				
						Belanja bantuan	:				
						Belanja modal	:				
						Belanja tidak terduga	:				
						Belanja transfer	:				
	c	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen data calon penerima rumah bagi korban bencana Kabupaten/ Kota atau yang terkena relokasi program Kabupaten/ Kota yang terverifikasi	Kab. Pasuruan	1 Dokumen		Rp 1.000.000	DAU		1 Dokumen	Rp 1.000.000
						Belanja operasi	: Rp 1.000.000				
						Belanja pegawai	:				
						Belanja barang dan jasa	: Rp 1.000.000				
						Belanja bunga	:				
						Belanja subsidi	:				
						Belanja hibah	:				
						Belanja bantuan	:				
						Belanja modal	:				
						Belanja tidak terduga	:				
						Belanja transfer	:				
	4.2	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi pengembangaan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP yang dilakukan	Kab. Pasuruan	1 kali		Rp 1.000.000			1 kali	Rp 1.000.000

	a	Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR - FLPP	Kab. Pasuruan	10 Orang		Rp 1.000.000	DAU		10 Orang	Rp 1.000.000
						Belanja operasi	: Rp 1.000.000				
						Belanja pegawai	:				
						Belanja barang dan jasa	: Rp 1.000.000				
						Belanja bunga	:				
						Belanja subsidi	:				
						Belanja hibah	:				
						Belanja bantuan	:				
						Belanja modal	:				
						Belanja tidak terduga	:				
						Belanja transfer	:				
	4.3	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Izin SKGB yang diterbitkan	Kab Pasuruan	5 Dokumen		Rp 1.000.000				Rp 1.000.000
	a	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi peneribitan Sertifikat Kepemilikan Banguna Gedung (SKGB)	Kab. Pasuruan	5 Laporan		Rp 1.000.000	DAU		5 Laporan	Rp 1.000.000
						Belanja operasi	: Rp 1.000.000				
						Belanja pegawai	:				
						Belanja barang dan jasa	: Rp 1.000.000				
						Belanja bunga	:				
						Belanja subsidi	:				
						Belanja hibah	:				
						Belanja bantuan	:				
						Belanja modal	:				
						Belanja tidak terduga	:				
						Belanja transfer	:				
	4.4	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah dokumen rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan	Kab Pasuruan	3 Dokumen		Rp 100.000.000			3 Dokumen	Rp 100.000.000
	a	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	Kab. Pasuruan	3 Laporan		Rp 100.000.000	DAU		3 Laporan	Rp 100.000.000
						Belanja operasi	: Rp 100.000.000				
						Belanja pegawai	:				
						Belanja barang dan jasa	: Rp 100.000.000				
						Belanja bunga	:				
						Belanja subsidi	:				
						Belanja hibah	:				
						Belanja bantuan	:				
						Belanja modal	:				
						Belanja tidak terduga	:				
						Belanja transfer	:				
	4.5	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Luas Pembangunan dan Rehabilitasi Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Kab Pasuruan	100%		Rp 2.576.000.000			100%	Rp 2.576.000.000
	a	Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana Kabupaten/ Kota atau yang terkena relokasi program Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	2 Dokumen		Rp 1.000.000	DAU		2 Dokumen	Rp 1.000.000
						Belanja operasi	: Rp 1.000.000				
						Belanja pegawai	:				
						Belanja barang dan jasa	: Rp 1.000.000				
						Belanja bunga	:				
						Belanja subsidi	:				
						Belanja hibah	:				
						Belanja bantuan	:				
						Belanja modal	:				
						Belanja tidak terduga	:				
						Belanja transfer	:				

	b	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/ Kota yang terehabilitasi	Kab. Pasuruan	15 Unit Rumah		Rp 375.000.000	DAU		15 Unit Rumah	Rp 375.000.000
						Belanja operasi	: Rp 375.000.000				
						Belanja pegawai	:				
						Belanja barang dan jasa	: Rp 375.000.000				
						Belanja bunga	:				
						Belanja subsidi	:				
						Belanja hibah	:				
						Belanja bantuan	:				
						Belanja modal	:				
						Belanja tidak terduga	:				
						Belanja transfer	:				
	c	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana Kabupaten/ Kota atau yang terkena relokasi program Kabupaten/ Kota yang terbangun	Kab. Pasuruan	5 Unit Rumah		Rp 2.200.000.000	DAU		5 Unit Rumah	Rp 2.200.000.000
						Belanja operasi	: Rp 2.200.000.000				
						Belanja pegawai	:				
						Belanja barang dan jasa	: Rp 2.200.000.000				
						Belanja bunga	:				
						Belanja subsidi	:				
						Belanja hibah	:				
						Belanja bantuan	:				
						Belanja modal	:				
						Belanja tidak terduga	:				
						Belanja transfer	:				
	5	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum**	**Kab. Pasuruan**	**100%**		**Rp 3.000.000.000**			**100%**	**Rp 3.000.000.000**
	5.1	Kegiatan Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi	Jumlah koordinasi pengadaan tanah	Kab Pasuruan	100%		Rp 3.000.000.000			100%	Rp 3.000.000.000
	a	Sub Kegiatan Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah	Jumlah data rencana pengadaan tanah berdasarkan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)	Kab. Pasuruan	1 Berita Acara		Rp 3.000.000.000	DAU		1 Berita Acara	Rp 3.000.000.000
						Belanja operasi	: Rp 3.000.000.000				
						Belanja pegawai	:				
						Belanja barang dan jasa	: Rp 3.000.000.000				
						Belanja bunga	:				
						Belanja subsidi	:				
						Belanja hibah	:				
						Belanja bantuan	:				
						Belanja modal	:				
						Belanja tidak terduga	:				
						Belanja transfer	:				
	6	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	**Kab. Pasuruan**	**100%**		**Rp 50.000.000**			**100%**	**Rp 50.000.000**
	6.1	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Kabupaten/ Kota	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	Kab Pasuruan	100%		Rp 50.000.000			100%	Rp 50.000.000
	a	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	1 Berita Acara		Rp 50.000.000	DAU		1 Berita Acara	Rp 50.000.000
						Belanja operasi	: Rp 50.000.000				
						Belanja pegawai	:				
						Belanja barang dan jasa	: Rp 50.000.000				
						Belanja bunga	:				
						Belanja subsidi	:				
						Belanja hibah	:				
						Belanja bantuan	:				
						Belanja modal	:				
						Belanja tidak terduga	:				
						Belanja transfer	:				

	7	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase masyarakat yang menerima ganti kerugian**	**Kab. Pasuruan**	**100%**		**Rp**	**2.000.000**			**100%**	**Rp**	**2.000.000**
	7.1	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah	Kab Pasuruan	100%		Rp	2.000.000			100%	Rp	2.000.000
	a	Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keputusan Bupati/ Walikota tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Kab. Pasuruan	2 Dokumen		Rp	1.000.000	DAU		2 Dokumen	Rp	1.000.000
						Belanja operasi :	Rp	1.000.000					
						Belanja pegawai :							
						Belanja barang dan jasa :	Rp	1.000.000					
						Belanja bunga :							
						Belanja subsidi :							
						Belanja hibah :							
						Belanja bantuan :							
						Belanja modal :							
						Belanja tidak terduga :							
						Belanja transfer :							
	b	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	1 Dokumen		Rp	1.000.000	DAU		1 Dokumen	Rp	1.000.000
						Belanja operasi :	Rp	1.000.000					
						Belanja pegawai :							
						Belanja barang dan jasa :	Rp	1.000.000					
						Belanja bunga :							
						Belanja subsidi :							
						Belanja hibah :							
						Belanja bantuan :							
						Belanja modal :							
						Belanja tidak terduga :							
						Belanja transfer :							
	8	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRA TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Persentase Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**	**Kab. Pasuruan**	**100%**		**Rp**	**4.000.000**			**100%**	**Rp**	**4.000.000**
	8.1	Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum	Kab Pasuruan	100%		Rp	2.000.000			100%	Rp	2.000.000
	a	Sub Kegiatan Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah data inventarisasi subjek penerima redistribusi tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	3 Dokumen		Rp	1.000.000	DAU		3 Dokumen	Rp	1.000.000
						Belanja operasi :	Rp	1.000.000					
						Belanja pegawai :							
						Belanja barang dan jasa :	Rp	1.000.000					
						Belanja bunga :							
						Belanja subsidi :							
						Belanja hibah :							
						Belanja bantuan :							
						Belanja modal :							
						Belanja tidak terduga :							
						Belanja transfer :							

	b	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Kab. Pasuruan	1 Dokumen		Rp 1.000.000	DAU		1 Dokumen	Rp 1.000.000
						Belanja operasi	: Rp 1.000.000				
						Belanja pegawai	:				
						Belanja barang dan jasa	: Rp 1.000.000				
						Belanja bunga	:				
						Belanja subsidi	:				
						Belanja hibah	:				
						Belanja bantuan	:				
						Belanja modal	:				
						Belanja tidak terduga	:				
						Belanja transfer	:				
	8.2	Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/ Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum	Kab Pasuruan	100%		Rp 2.000.000			100%	Rp 2.000.000
	a	Sub Kegiatan Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data inventarisasi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	1 Dokumen		Rp 1.000.000	DAU		1 Dokumen	Rp 1.000.000
						Belanja operasi	: Rp 1.000.000				
						Belanja pegawai	:				
						Belanja barang dan jasa	: Rp 1.000.000				
						Belanja bunga	:				
						Belanja subsidi	:				
						Belanja hibah	:				
						Belanja bantuan	:				
						Belanja modal	:				
						Belanja tidak terduga	:				
						Belanja transfer	:				
	b	Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	1 Dokumen		Rp 1.000.000	DAU		1 Dokumen	Rp 1.000.000
						Belanja operasi	: Rp 1.000.000				
						Belanja pegawai	:				
						Belanja barang dan jasa	: Rp 1.000.000				
						Belanja bunga	:				
						Belanja subsidi	:				
						Belanja hibah	:				
						Belanja bantuan	:				
						Belanja modal	:				
						Belanja tidak terduga	:				
						Belanja transfer	:				
	9	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Persentase Tanah Kosong yang termanfaatkan**	**Kab. Pasuruan**	**100%**		**Rp 100.000.000**			**100%**	**Rp 100.000.000**
	9.1	Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Persentase Tanah Kosong yang termanfaatkan	Kab Pasuruan	100%		Rp 1.000.000			100%	Rp 1.000.000

	a	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan koordinasi dalam rangka penyelesaian tanah kosong	Kab. Pasuruan	1 Laporan		Rp 1.000.000	DAU		1 Laporan	Rp 1.000.000
						Belanja operasi	: Rp 1.000.000				
						Belanja pegawai	:				
						Belanja barang dan jasa	: Rp 1.000.000				
						Belanja bunga	:				
						Belanja subsidi	:				
						Belanja hibah	:				
						Belanja bantuan	:				
						Belanja modal	:				
						Belanja tidak terduga	:				
						Belanja transfer	:				
	9.2	Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Akumulasi luas tanah kosong yang didata	Kab Pasuruan	21000 Ha		Rp 99.000.000			28000 Ha	Rp 99.000.000
	a	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah laporan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota yang diinventarisasi	Kab. Pasuruan	3 Laporan		Rp 98.000.000	DAU		3 Laporan	Rp 98.000.000
						Belanja operasi	: Rp 98.000.000				
						Belanja pegawai	:				
						Belanja barang dan jasa	: Rp 98.000.000				
						Belanja bunga	:				
						Belanja subsidi	:				
						Belanja hibah	:				
						Belanja bantuan	:				
						Belanja modal	:				
						Belanja tidak terduga	:				
						Belanja transfer	:				
	b	Sub Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah dokumen pemanfaatan tanah kosong	Kab. Pasuruan	1 Dokumen		Rp 1.000.000	DAU		1 Dokumen	Rp 1.000.000
						Belanja operasi	: Rp 1.000.000				
						Belanja pegawai	:				
						Belanja barang dan jasa	: Rp 1.000.000				
						Belanja bunga	:				
						Belanja subsidi	:				
						Belanja hibah	:				
						Belanja bantuan	:				
						Belanja modal	:				
						Belanja tidak terduga	:				
						Belanja transfer	:				
	10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase Tanah Aset Pemda yang Teridentifikasi Perencanaan Penggunaannya**	**Kab. Pasuruan**	**43,51%**		**Rp 400.000.000**			**43,51%**	**Rp 400.000.000**
	10.1	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah bidang tanah yang teridentifikasi perencanaan penggunaan tanah aset Pemda dan pelaksanaan konsolidasi tanah	Kab Pasuruan	2.886 Bidang		Rp 400.000.000			2.886 Bidang	Rp 400.000.000

	a	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	3 Laporan		Rp 300.000.000	DAU		3 Laporan	Rp 300.000.000
						Belanja operasi :	Rp 300.000.000				
						Belanja pegawai :					
						Belanja barang dan jasa :	Rp 300.000.000				
						Belanja bunga :					
						Belanja subsidi :					
						Belanja hibah :					
						Belanja bantuan :					
						Belanja modal :					
						Belanja tidak terduga :					
						Belanja transfer :					
	b	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	3 Dokumen		Rp 100.000.000	DAU		3 Dokumen	Rp 100.000.000
						Belanja operasi :	Rp 100.000.000				
						Belanja pegawai :					
						Belanja barang dan jasa :	Rp 100.000.000				
						Belanja bunga :					
						Belanja subsidi :					
						Belanja hibah :					
						Belanja bantuan :					
						Belanja modal :					
						Belanja tidak terduga :					
						Belanja transfer :					
	11	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	**Persentase pemanfaatan aset Pemda yang termanfaatkan**	**Kab. Pasuruan**	**99,83%**		**Rp 242.000.000**			**99,83%**	**Rp 242.000.000**
	11.1	Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah rekomendasi penerbitan izin membuka tanah	Kab Pasuruan	2 Rekomandasi		Rp 242.000.000			2 Rekomandasi	Rp 242.000.000
	a	Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah dokumen kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara	Kab. Pasuruan	2 Dokumen		Rp 242.000.000	DAU		2 Dokumen	Rp 242.000.000
						Belanja operasi :	Rp 242.000.000				
						Belanja pegawai :					
						Belanja barang dan jasa :	Rp 242.000.000				
						Belanja bunga :					
						Belanja subsidi :					
						Belanja hibah :					
						Belanja bantuan :					
						Belanja modal :					
						Belanja tidak terduga :					
						Belanja transfer :					
	12	**PROGRAM PENGURUSAN HAK-HAK ATAS TANAH**	**Persentase pengurusan hak atas tanaah**	**Kab. Pasuruan**	**100%**		**Rp 50.000.000**			**100%**	**Rp 50.000.000**
	12.1	Kegiatan Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah	Jumlah fasilitasi, inventarisasi dan pengurusan hak atas tanah aset pemerintah	Kab Pasuruan	400 Kegiatan		Rp 50.000.000			400 Kegiatan	Rp 50.000.000

	a	Sub Kegiatan Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	Jumlah data aset pemerintah	Kab. Pasuruan	4 Laporan		Rp 50.000.000	DAU		4 Laporan	Rp 50.000.000
						Belanja operasi	: Rp 50.000.000				
						Belanja pegawai	:				
						Belanja barang dan jasa	: Rp 50.000.000				
						Belanja bunga	:				
						Belanja subsidi	:				
						Belanja hibah	:				
						Belanja bantuan	:				
						Belanja modal	:				
						Belanja tidak terduga	:				
						Belanja transfer	:				
						Total Bel. Pegawai	**: Rp 5.658.811.037**				
						Total Bel. Brg.dan jasa	**: Rp 55.956.650.000**				
						Total Bel. Modal Peralatan dan Mesin	**:**				
						Total Bel. Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**:**				
						Total Bel. Hibah	**:**				
						Total Bel. Bantuan Sosial	**:**				
						Total DAU	**: Rp 55.615.461.037**				
						Total DAK	**:**				
						Total DBHCHT	**: Rp 6.000.000.000**				
						Total DID	**:**				
						Total Bantuan Prop	**:**				
						Pajak Rokok	**:**				
						Total Belanja	**: Rp 61.615.461.037**				

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Renja DPKP) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 serta dengan mempertimbangkan isu-isu yang berkembang. Penyusunan dokumen ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan ini didalamnya dirumuskan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan berdasarkan program, kegiatan sub kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024. Didasarkan pada analisa gambaran pelayanan kinerja Perangkat Daerah; dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, termasuk analisa terkait kebutuhan dan ketersediaan anggaran melalui mekanisme penentuan prioritas daerah, dan prioritas perangkat daerah.

Selanjutnya setelah Dokumen Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan ditetapkan, menjadi pedoman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan dalam menyusun RKA (Rincian Kerja dan Anggaran) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan:

a. Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui kepala BAPPEDA *(Pasal 291 dan Pasal 292 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017).*

b. Hasil pemantauan dan supervisi, digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program-kegiatan-subkegiatan, lokasi, dana indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasarannya disusun dalam RKA sesuai dengan RENJA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN

M. IRSYAD YUSUF